



2025
2029



Renstra

Dinas Pertanian
Kabupaten Gresik



distan.gresik@gmail.com

pertanian.gresikkab.go.id





**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

BUPATI GRESIK,



FANDIAKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,



ACHMAD WASHIL MIPTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada periode lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, serta kegiatan pembangunan sektor pertanian yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, serta selaras dengan kebijakan pembangunan pertanian di tingkat provinsi maupun nasional.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada evaluasi capaian periode sebelumnya, identifikasi potensi dan permasalahan, serta analisis isu-isu strategis yang dihadapi sektor pertanian. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi instrumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan pertanian, sekaligus sebagai acuan kerja seluruh jajaran Dinas Pertanian dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini tentunya memerlukan dukungan, komitmen, dan sinergi dari seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat, khususnya para petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini.

Semoga Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan sektor pertanian yang lebih maju, mandiri, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat Kabupaten Gresik.

Gresik, 18 September 2025
**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GRESIK**



Ir. EKO ANINDITO PUTRO., MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660914 199202 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	1
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK.....	7
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.....	7
2.1.2 Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Gresik ...	16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.....	18
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	49
2.1.5 Mitra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dalam Pemberian Pelayanan.....	50
2.1.6 Dukungan BUMN/BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik	50
2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.....	51
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.....	51
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	51
2.2.2 Isu Strategis.....	52
 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	57
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	57
3.2. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	66
3.3. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025- 2029.....	67
 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	68
4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	96
4.3. Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	134

4.4. Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	138
4.5. Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	139
4.6. Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.....	142
4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.....	145
4.8. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.....	146
BAB V PENUTUP	147

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Data ASN Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Menurut Golongan.....	16
Tabel 2.2. Data ASN Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Menurut Pendidikan.....	17
Tabel 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.....	21
Tabel 2.4. Kinerja Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.....	47
Tabel 2.5. Kinerja Pendapatan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.....	48
Tabel 2.6. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.....	53
Tabel 3.1. Misi Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029...	57
Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.....	59
Tabel 3.3. Penahapan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.....	62
Tabel 3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.....	67
Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan.....	69
Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.	96
Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	135
Tabel 4.4. Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	138
Tabel 4.5. Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	139
Tabel 4.6. Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.....	142
Tabel 4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2030.....	145
Tabel 4.8. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2030.....	146

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sektor pertanian dalam jangka menengah lima tahunan. Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk memberikan arah pembangunan pertanian yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan sesuai dengan potensi wilayah serta tantangan yang dihadapi, sekaligus menjadi pedoman kerja bagi seluruh jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, baik sebagai penyedia pangan, penyerap tenaga kerja, sumber bahan baku industri, maupun penggerak perekonomian masyarakat perdesaan. Kabupaten Gresik sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur memiliki potensi besar pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah optimal bagi peningkatan kesejahteraan petani, karena masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain: semakin menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan; dampak perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam dan produktivitas; fluktuasi harga komoditas pertanian yang memengaruhi stabilitas pendapatan petani; keterbatasan sarana prasarana produksi pertanian; rendahnya nilai tambah produk pertanian di tingkat petani; serta masih terbatasnya kapasitas kelembagaan petani dan SDM pertanian.

Selain tantangan internal, dinamika global dan nasional juga turut memengaruhi pembangunan pertanian daerah. Isu ketahanan pangan, pengendalian inflasi pangan, keberlanjutan lingkungan hidup, serta peningkatan daya saing produk lokal di tengah persaingan pasar bebas menjadi tantangan sekaligus peluang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pertanian dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan pertanian yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan pertanian tingkat nasional dan provinsi.

Dengan demikian, Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan sektor pertanian yang efektif, efisien, dan berkelanjutan guna mewujudkan peningkatan produksi pertanian, ketahanan pangan daerah, pengendalian inflasi pangan, serta kesejahteraan petani di Kabupaten Gresik.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
10. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;

31. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan

Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maka Dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I :PENDAHULUAN, yang memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK, yang memuat Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, yang memuat Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, Arah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN yang memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK);
- BAB V : PENUTUP yang memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Dinas Pertanian Kabupaten Gresik menyelenggarakan pelayanan publik di sektor pertanian yang mencakup penyediaan sarana dan prasarana produksi, penyuluhan dan pendampingan petani, perlindungan tanaman, pengembangan peternakan dan kesehatan hewan, serta penguatan kelembagaan dan akses pasar. Seluruh pelayanan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, menjaga ketahanan pangan, dan mendorong daya saing komoditas unggulan daerah, sehingga sektor pertanian mampu berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Dinas Pertanian Kabupaten Gresik merupakan perangkat daerah yang mempunyai kedudukan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanian. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok: **“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.”**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pertanian yang meliputi prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Pengembangan prasarana pertanian penyediaan infrastruktur dan prasarana pendukung di bidang pertanian dan pangan;
- d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, infrastruktur, prasarana pendukung dan produksi di bidang pertanian dan pangan;

- f. Pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- g. Pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengadaan pengawasan infrastruktur dan prasarana pendukung, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian dan pangan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pertanian dan urusan pangan;
- i. Pelaksanaan tugas pembantuan urusan pertanian dan urusan pangan; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021 susunan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Peternakan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi Sub Unit Kerja setingkat di bawah Kepala Dinas, berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dinas serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi

dan pelaporan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris dinas;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Pertanian;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pertanian; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

2. Bidang Pangan

Bidang Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan di bidang pangan. Kepala Bidang Pangan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan penyediaan infrastruktur pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- e. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan harga pangan serta penganekaragaman dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- g. Pelaksanaan administrasi program di bidang ketahanan pangan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan

Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pertanian dan pangan di bidang sarana, prasarana dan penyuluhan. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian dan penyuluhan;
- b. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- c. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- d. Pemberian bimbingan teknis pemupukan modal usaha tani dan pemberian fasilitasi teknis investasi pertanian;
- e. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- f. Pengelolaan kelembagaan, fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian dan penyuluhan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan

pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan, perencanaan, program dan kegiatan teknis budidaya, produksi, serta perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Mengkompulsi, menyusun dan menganalisa data pokok dan statistik di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan guna perencanaan dan program kegiatan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kelompok/gabungan kelompok, usaha penangkaran/eksport import komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan bibit dan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Pembinaan, pendampingan serta penerapan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Berperan serta dalam pengembangan riset dan iptek mengenai tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. Pemberian rekomendasi izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pertanian di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kepala Bidang Peternakan dalam melaksanakan tugas, rnenyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan di Bidang Peternakan;

- b. Penyusunan kebijakan di bidang peternakan meliputi bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Peternakan;
- c. Pengelolaan sumber daya genetic hewan;
- d. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan bibit ternak, pakan ternak, dan bibit hijauan pakan ternak;
- e. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- f. Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- h. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- i. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. Pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Peternakan; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Unit Pelaksana Teknis

Dinas Pertanian Kabupaten Gresik memiliki lima Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, terdiri dari :

- A. UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian di Bawean
- B. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang;
- C. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng;
- D. UPT Taman Teknologi Pertanian;
- E. UPT Rumah Pemotongan Hewan.

Adapun rincian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:

A. UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian di Bawean

UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian di Bawean mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional Dinas Pertanian dalam melaksanakan penyuluhan pertanian di Bawean. Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian, di Bawean, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional penyuluhan pertanian di Bawean;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan teknis pelaksanaan penyuluhan pertanian di Bawean;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kegiatan operasional dan fungsional penyuluhan pertanian di Bawean;
- d. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka pembinaan kelompok tani dan/atau petani dalam mengembangkan komoditas pertanian di Bawean;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menghimpun serta mengirimkan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian di Bawean; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

B. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang

UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional kesehatan hewan di Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang.

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan pusat kesehatan hewan di balongpanggang;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional dalam rangka pusat pengelolaan pusat kesehatan hewan di balongpanggang;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi, kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan pusat kesehatan hewan di balongpanggang;
- d. pengendalian kegiatan pengelolaan pusat kesehatan hewan di balongpanggang; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan pusat kesehatan hewan di balongpanggang;

- e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

C. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng

UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional kesehatan hewan di Pusat Kesehatan Hewan di Panceng. Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan pusat kesehatan hewan di Panceng;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional dalam rangka pusat pengelolaan pusat kesehatan hewan di Panceng;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi, kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan pusat kesehatan hewan di Panceng;
- d. pengendalian kegiatan pengelolaan pusat kesehatan hewan di Panceng;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan pusat kesehatan hewan di Panceng;
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

D. UPT Taman Teknologi Pertanian

UPT Taman Teknologi Pertanian mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan Taman Teknologi Pertanian. Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Taman Teknologi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pelaksanaan pengelolaan Taman Teknologi Pertanian;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan Taman Teknologi Pertanian;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan Taman Teknologi Pertanian;
- d. pengendalian kegiatan pengelolaan Taman Teknologi Pertanian;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Taman Teknologi Pertanian;

- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

E. UPT Rumah Potong Hewan

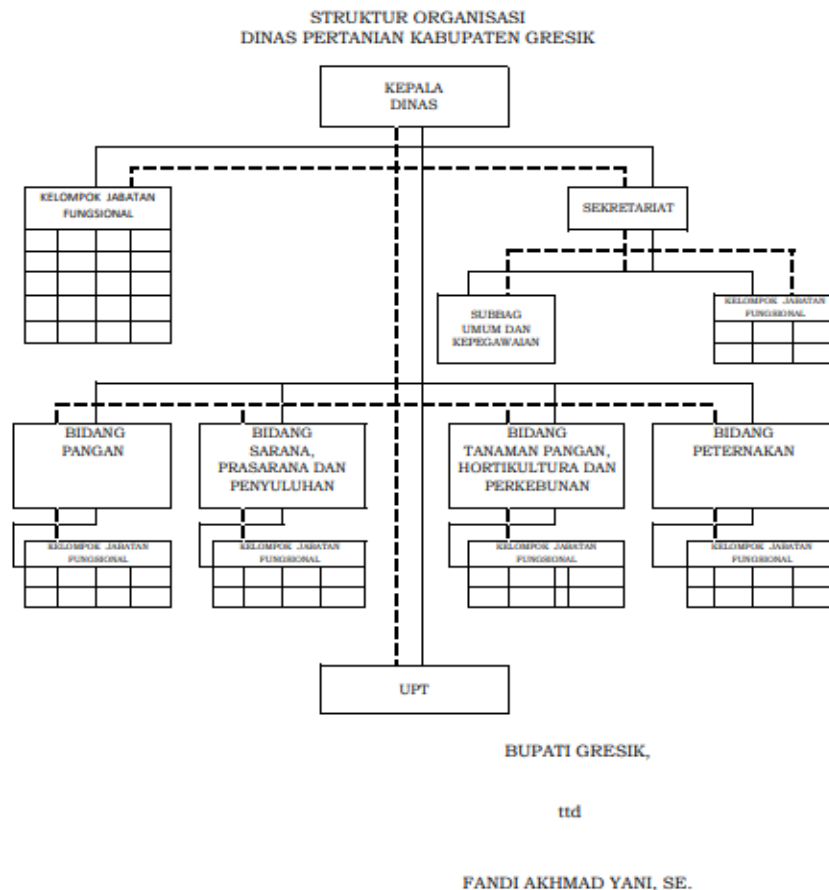
UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan Rumah Potong Hewan. Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan Rumah Potong Hewan;
- b. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan kalayakan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan;
- c. pelayanan administrasi, pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. pelaksanaan pengembangan sarana, prasarana dan teknologi pengelolaan Rumah Potong Hewan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengelolaan Rumah Potong Hewan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Pasal 3 Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pertanian Kabupaten Gresik**

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

2.1.2.1 Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pertanian Kabupaten Gresik didukung oleh sumber daya aparatur dengan latar belakang pendidikan, keahlian, dan kompetensi yang beragam. Namun demikian, peningkatan kapasitas aparatur masih perlu terus dilakukan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi pertanian modern, digitalisasi layanan, dan pengelolaan data pertanian berbasis sistem informasi. Sumber Daya Aparatur yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gresik berdasarkan data per Agustus 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Data ASN Dinas Pertanian Kabupaten Gresik
Menurut Golongan**

No	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV/c	1

No	GOLONGAN	JUMLAH
2	IV/b	1
3	IV/a	12
4	III/d	16
5	III/c	1
6	III/b	11
7	III/a	11
8	II/d	4
9	II/c	2
10	II/b	3
11	II/a	1
12	IX	28
13	V	2
TOTAL		93

Tabel 2.2. Data ASN Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Menurut Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S-2	14
2	S-1	63
3	Diploma III/Sarjana Muda	3
4	SLTA Kejuruan	3
5	SLTA/SMA	10
TOTAL		93

2.1.2.2 Sumber Daya Aset

Gedung Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Gresik bertempat di Lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Gresik yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik, yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Gresik. Sedangkan dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Gedung kantor Dinas Pertanian sebanyak 1 Unit
2. Gedung kantor UPT sebanyak 4 Unit
3. Gedung kantor BPP sebanyak 16 Unit
4. Ruang Kepala Dinas sebanyak 1 Unit
5. Ruang Sekretaris Dinas sebanyak 1 Unit
6. Ruang kerja Bidang sebanyak 5 Unit
7. Ruang rapat sebanyak 2 Unit

8. Meja dan Kursi Kerja sebanyak 75 Unit
9. Komputer sebanyak 40 Unit
10. Kendaraan roda empat sebanyak 13 Unit
11. Kendaraan roda dua sebanyak 327 Unit

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Secara keseluruhan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik telah menunjukkan keberhasilan dalam capaian kinerja sebagaimana tersaji pada Tabel 2.3. Pencapaian kinerja sasaran diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Pada indikator persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian kinerja sangat melampaui target, terutama pada tahun 2024 realisasi 2,87% jauh di atas target 0,477%, sehingga capaian mencapai 601%. Ini menunjukkan adanya lonjakan produksi yang sangat signifikan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Lonjakan produksi terutama terjadi pada komoditas hortikultura dimana pada tahun 2024 telah dimasukkan komoditas baru yaitu jeruk nipis dalam penghitungan produksi hortikultura, sehingga terjadi penambahan jumlah produksi yang sangat signifikan. Disisi lain faktor penyebab peningkatan produksi diantaranya penerapan Inovasi teknologi dan praktik budidaya seperti penggunaan benih unggul, pupuk organik, mekanisasi pertanian; Kondisi iklim/cuaca yang mendukung dimana musim tanam yang baik sehingga produktivitas meningkat; Intervensi program pemerintah seperti bantuan sarana dan prasarana produksi, penyuluhan pertanian, akses pasar yang lebih baik; Harga pasar dan permintaan yang tinggi sehingga mendorong petani untuk meningkatkan produksi. Implikasi positif dari capaian kinerja tersebut adalah menunjukkan keberhasilan program dan tingginya daya saing sektor pertanian, potensi peningkatan pendapatan petani serta kontribusi terhadap ketahanan pangan daerah/nasional. Namun perlu ditambahkan catatan penting yakni perlu kajian apakah capaian ini benar-benar sustainable (berkelanjutan) atau hanya anomali sementara akibat faktor eksternal (misalnya harga pasar tinggi atau musim yang sangat baik). Ke depan, target perlu disusun lebih realistis dengan mempertimbangkan tren historis dan potensi riil, agar lebih mencerminkan kondisi sebenarnya.

Pada indikator persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan kinerja mencapai target dengan baik. Terutama pada tahun 2024 dimana realisasi 0,46% sedikit lebih tinggi dari target 0,42% sehingga capaian berada di 110%. Hal ini menunjukkan bahwa program peningkatan produksi perkebunan mampu berjalan efektif dan sesuai harapan. Pada indikator ini juga menunjukkan pencapaian yang stabil dan realistis, perbedaan target dan realisasi yang tidak terlalu jauh, sehingga target dapat dikatakan realistis dan tepat sasaran. Hal ini berbeda dengan indikator sebelumnya (pertanian) yang melampaui target secara ekstrem (601%). Faktor pendorong peningkatan produksi kemungkinannya antara lain perbaikan teknik budidaya perkebunan (pemangkasan, pemupukan, pengendalian hama); Akses sarana produksi yang lebih baik (pupuk, bibit unggul); Dukungan kebijakan/program pemerintah daerah untuk komoditas unggulan perkebunan; Harga pasar komoditas perkebunan yang stabil/naik sehingga petani lebih termotivasi meningkatkan produksi. Implikasi positifnya adalah produksi perkebunan menunjukkan pertumbuhan yang sehat, sesuai dengan proyeksi, menunjukkan ketepatan perencanaan target dan efektivitas program, memberikan kontribusi pada ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani perkebunan. Catatan untuk keberlanjutan meski capaian sudah baik, peningkatan sebesar 0,04 poin masih relatif kecil dalam angka absolut. Perlu strategi penguatan produktivitas yang lebih inovatif agar capaian tahun-tahun mendatang bisa lebih signifikan. Monitoring kualitas produksi juga penting agar tidak hanya kuantitas yang meningkat, tetapi juga mutu hasil perkebunan.

Pada indikator persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan kinerja hampir sesuai target, terutama di tahun 2024 dimana realisasi 2,02% hanya sedikit di bawah target 2,03%. Capaian 99% menunjukkan bahwa sasaran hampir tercapai penuh (gap hanya 0,01). Capaian kinerja indikator ini menunjukkan adanya stabilitas produksi peternakan. Angka ini menandakan bahwa program peningkatan produksi peternakan terkendali dan konsisten. Perencanaan target cukup realistis karena perbedaan target–realisasi sangat kecil. Faktor yang mungkin mempengaruhi capaian kinerja peternakan ini diantaranya ketersediaan pakan yang memadai, kesehatan ternak relatif terjaga meski potensi gangguan penyakit ternak tetap ada, dukungan teknologi peternakan misalnya inseminasi buatan. Implikasi positifnya adalah kinerja peternakan sangat dekat dengan rencana sehingga mencerminkan efisiensi dan

efektivitas program. Hal ini menunjukkan kemampuan peternak menjaga konsistensi produksi meskipun ada tantangan di lapangan. Catatan untuk perbaikan meskipun gap sangat kecil, tetap perlu analisis penyebab mengapa realisasi tidak mencapai target 100% (misalnya cuaca, penyakit ternak, biaya produksi, atau daya beli pasar). Upaya peningkatan produktivitas harus memperhatikan daya dukung lingkungan agar peningkatan tidak menimbulkan risiko jangka panjang misalnya limbah peternakan atau defisit pakan.

Pada indikator rasio ketersediaan pangan utama kinerja hampir mencapai target, terutama pada tahun 2024 realisasi 184,04 kg/kapita/tahun hanya sedikit di bawah target 190 kg/kapita/tahun. Capaian 96,86% menunjukkan ketersediaan pangan utama relatif terjaga, meski belum sepenuhnya sesuai target. Capaian kinerja ini menunjukkan tingkat ketahanan pangan masih baik. Angka 184,04 kg/kapita/tahun sudah berada pada level yang cukup tinggi dan mendukung ketahanan pangan. Selisih 5,96 kg/kapita/tahun dari target tidak terlalu besar, namun tetap penting dicermati. Faktor yang mungkin menyebabkan kekurangan diantaranya produksi domestik mengalami fluktuasi akibat iklim/cuaca ekstrem atau keterbatasan lahan; distribusi dan logistik pangan belum optimal sehingga ketersediaan di beberapa wilayah tidak merata; permintaan pangan meningkat karena pertumbuhan penduduk atau perubahan pola konsumsi; ketergantungan pada impor untuk pangan tertentu, yang bisa terganggu oleh harga dan pasokan global. Implikasi dari capaian kinerja ini adalah ketahanan pangan masih cukup kuat, namun potensi kerentanan tetap ada jika produksi terganggu. Selisih kecil ini mengingatkan bahwa sektor pangan harus terus diperkuat, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan gejolak pasar internasional. Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti kedepan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan antara lain diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu, penguatan cadangan pangan pemerintah/daerah untuk mengantisipasi defisit sementara, inovasi teknologi produksi dan pascapanen untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan distribusi dan akses pangan agar ketersediaan lebih merata di seluruh wilayah. Kesimpulannya adalah capaian 96,86% menunjukkan kinerja baik meskipun sedikit di bawah target. Hal ini menandakan bahwa ketahanan pangan relatif terjaga, tetapi masih perlu penguatan di sisi produksi dan distribusi agar lebih tahan terhadap guncangan eksternal.

Tabel 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Rasio ketersediaan pangan utama (kg/kapita/th)	v					194	-	-	-	-	180,1	-	-	-	-	92,84	-	-	-	-	Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian
2	Nilai Tukar Petani (%)	v					109,42	-	-	-	-	100,77	-	-	-	-	92,09	-	-	-	-	
3	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian (%)	v					-	4,00	4	4	5	-	-3,01	3,17	3,20	1,63	-	-75,25	79,25	80,00	32,60	Menurunnya ketimpangan ekonomi antar sektor dan antar wilayah
4	Persentase Peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian (%)		v				0,6	0,47	0,472	0,475	0,477	0,57	0,44	0,435	0,45	2,87	95,00	93,59	92,16	94,19	601,07	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan
5	Persentase Peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan (%)		v				0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,35	0,32	0,33	0,46	102,44	83,08	77,40	77,47	110,16	
6	Persentase Peningkatan Produksi komoditas unggulan peternakan (%)		v				10	2	2,01	2,02	2,03	11,15	2,08	1,33	1,74	2,02	111,50	104,04	66,21	86,28	99,69	
7	Persentase peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) (%)		v				0,186	-	-	-	-	0,186	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Meningkatnya kesejahteraan pelaku pertanian
8	Rasio ketersediaan pangan utama (kg/kapita/th)		v				-	183	185	190	190	-	167,38	180,73	183,27	184,04	-	91,32	97,63	96,44	96,86	Meningkatnya ketahanan pangan
9	Persentase Stabilitas Harga Pangan Utama (%)			v			88	-	-	-	-	85,16	-	-	-	-	96,77	-	-	-	-	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
10	Jumlah terlaksananya pembinaan dan pengawasan kelompok tani dan pemilik RMU yang berperan dalam pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan (RMU)						50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat
11	Jumlah tersedianya data tentang perkembangan harga pangan tingkat produsen (data harga)						16	-	-	-	-	16	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
12	Pola Pangan Harapan (Angka)			v			90	-	-	-	-	89,9	-	-	-	-	99,89	-	-	-	-	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
13	Terlaksananya kegiatan pertemuan kelompok dalam rangka pembinaan administrasi (kelompok lumbung)						41	-	-	-	-	41	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14	Persentase Keamanan Pangan Segar (%)			v			79	-	-	-	-	87,5	-	-	-	-	110,76	-	-	-	-	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
15	Lomba, Pembinaan Kelompok dan Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka Hari Pangan Sedunia (kali)						4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-	Kegiatan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
16	Persentase kelompok tani dengan klasifikasi utama (%)			v			0,54	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	83,33	-	-	-	-	Program pemberdayaan kelompok tani
17	jumlah kelompok PUAP yang dimonev (Gapoktan)						100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan usaha agribisnis perdesaan
18	jumlah RDKK tingkat desa (desa)						278	-	-	-	-	278	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok
19	jumlah leaflet yang dicetak (lembar)						1500	-	-	-	-	1500	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan bimbingan dan penyuluhan pertanian
20	jumlah poster yang dicetak (lembar)						1000	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
21	buku harian penyuluh (buku)						66	-	-	-	-	66	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
22	jumlah bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan (kali)						14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
23	Persentase Jumlah Olahan Produk Unggulan Pertanian yang dipasarkan (%)			v			100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan/ peternakan
24	jumlah kegiatan promosi dan pameran produk pangan unggulan lokal (kali)						2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan lomba dan promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah
25	Persentase penanganan luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang terserang hama dan penyakit (%)			v			80	-	-	-	-	83	-	-	-	-	103,75	-	-	-	-	Program perlindungan tanaman pangan dan hortikultura
26	jumlah peserta gerakan PHT (orang)						275	-	-	-	-	275	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan Gerakan pengendalian hama dan penyakit tanaman
27	jumlah peserta rapat koordinasi PHT dan DPI (orang)						50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
28	jumlah Rubuha (unit)						32	-	-	-	-	32	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
29	Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Pangan dan Hortikultura (Ton)			v			677929	-	-	-	-	696461	-	-	-	-	102,73	-	-	-	-	Program peningkatan produksi pangan dan hortikultura
30	Jumlah peserta rapat koordinasi pengembangan tanaman sereal, rapt pupuk, bahan percontohan/ praktek benih kacang hijau dan pupuk organik (orang)						50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan Sosialisasi gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu (gpptt)
31	Jumlah pengadaan bahan praktek percontohan bibit sukun dan bibit pisang cavendish (paket)						1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan Peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura
32	Jumlah pengadaan bahan praktek percontohan pupuk organik (paket)						1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
33	jumlah pengadaan bahan praktek percontohan pengembangan kawqasan sayuran (paket)						1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
34	Jumlah produksi komoditas Unggulan Perkebunan (Ton)			v			163244	-	-	-	-	164959,8	-	-	-	-	101,05	-	-	-	-	Program peningkatan produksi perkebunan
35	jumlah peserta Bimtek Tanaman Tebu (orang)						25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan
36	jumlah benih siwalan (batang)						100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
37	jumlah pupuk ZA (KBD) (kg)						400	-	-	-	-	400	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
38	jumlah pupuk NPK (KBD) (kg)						500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
39	jumlah pupuk organik (siwalan) (kg)						100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
40	jumlah pupuk NPK (siwalan) (kg)						100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
41	jumlah peserta pelatihan penangkaran benih/bibit perkebunan (orang)						50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
42	jumlah peserta pelatihan Pengembanagan Budidaya Tanaman Perkebunan (siwalan) (orang)						60	-	-	-	-	60	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
43	jumlah peserta pelatihan Peningkatan Mutu Tanaman Perkebunan (kopi) (orang)						50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
44	jumlah pserta pelatihan fasilitasi dan penyuluhan komoditi perkebunan (orang)						20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
45	jumlah peserta pelatihan pengembangan budidaya tanaman perkebunan (kelapa) (orang)						50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
46	Persentase penyuluh bersertifikat (%)			v			50	-	-	-	-	20,31	-	-	-	-	40,62	-	-	-	-	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan/ peternakan lapangan
47	jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian swadaya (orang)						65	-	-	-	-	65	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan/ peternakan
48	jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian lapangan (orang)						60	-	-	-	-	60	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
49	Jumlah pelaksanaan penilaian kelas kelompok (kali)						6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
50	jumlah dokumen program penyuluhan tingkat kecamatan (buku)						32	-	-	-	-	32	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan Penyusunan program penyuluhan pertanian
51	jumlah dokumen programa penyuluhan tingkat kabupaten (buku)						3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
52	jumlah BPP yang difasilitasi (unit)						3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegitana Pembangunan/perbaikan balai penyuluh pertanian (bpp) di kecamatan dan sarana pendukungnya (dak)

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
53	Persentase Infrastruktur Pendukung pertanian dalam kondisi baik (%)			v			26,19	-	-	-	-	29,91	-	-	-	-	114,20	-	-	-	-	Program pengembangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan/ peternakan
54	jumlah peserta sosialisasi bantuan keuangan berupa JUT (orang)						90	-	-	-	-	90	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan Perencanaan, sosialisasi, monitoring dan pengendalian bantuan jalan usaha tani (jut)
55	Jumlah peserta koordinasi pelaksanaan bantuan jalan usaha tani (orang)						45	-	-	-	-	45	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
56	jumlah monitoring pelaksanaan bantuan JUT (kali)						9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
57	jumlah peserta sosialisasi dan koordinasi bantuan keuangan berupa JIP (orang)						30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan Perencanaan, sosialisasi, monitoring dan pengendalian bantuan jaringan irigasi pertanian (jip)
58	jumlah koordinasi luar daerah dalam rangka perencanaan, monitoring dan pelaporan dana DAK (kali)						1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
59	jumlah sumber-sumber air yang dibangun/diperbaiki (unit)						4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan Pembangunan/perbaikan sumber-sumber air meliputi ait tanah (angkal/dalam)/embung/dam parit/pintu air/long storage (dak)
60	jumlah peserta rapat monitoring dan pemnafaatan alsintan (BPP)						2	-	-	-	-	2	-	-	-	-		-	-	-	-	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
61	Jumlah pembinaan kelompok HIPPA						25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan Pemberdayaan petani pemakai air
62	jumlah peserta sosialisasi penyusunan peta delineasi pemilik lahan LP2B (orang)						40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan Audit lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b)
63	Jumlah peserta kegiatan inventarisasi data pemilik lahan LP2B (orang)						40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
64	jumlah peserta koordinasi perumusan pemberian insentif pengelola LP2B melalui kartu tani (orang)						75	-	-	-	-	75	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
65	jumlah peta deliniasi pemilik LP2B kecamatan yang disusun (paket)						1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan Pemetaan jaringan irigasi dan sumber-sumber air pertanian
66	jumlah buku profil pertanian Kab. Gresik (paket)						1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
67	Jumlah perencanaan jaringan irigasi tersier yang disusun (paket)						1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
68	belanja modal drone (unit)						1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
69	belanja modal garmin (GPS) (buah)						3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
70	pelatihan dan sertifikasi pilot drone (paket)						1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
71	Persentase Penanganan terhadap jumlah ternak yang terserang penyakit (%)			v			86,59	-	-	-	-	87	-	-	-	-	100,47	-	-	-	-	
72	jumlah nobat pencegahan penyakit menular ternak (jenis)						21	-	-	-	-	21	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
73	jumlah peralatan pemeliharaan kesehatan ternak (jenis)						15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
74	jumlah hasil pemeriksaan laboratorium bahan asal hewan (sampel)						24	-	-	-	-	24	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
75	jumlah obat-obatan untuk kesehatan ternak hewan qurban (jenis)						7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
76	jumlah alat untuk kesehatan hewan qurban (jenis)						6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
77	Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Peternakan (Ton)			v			3897,41	-	-	-	-	15143,08	-	-	-	-	388,54	-	-	-	-	
78	belanja peralatan peternakan (jenis)						3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
79	belanja vaksin unggas (dosis)						100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak
80	belanja pakaian kerja lapangan (buah)						50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
81	Alat peraga (paket)						1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan pengolahan hasil ternak
82	Persentase penanganan luas lahan Tanaman Perkebunan yang terserang hama dan penyakit (%)			v			100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Program perlindungan tanaman perkebunan
83	jumlah peserta pertemuan teknis antisipasi Dampak Anomali Iklim (orang)						50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan
84	jumlah rodentisida (kg)						15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
85	Cakupan Varietas Bahan Baku nikotin Rendah (%)			v			2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Program peningkatan kualitas bahan baku
86	Persentase kelompok tani tembakau yang difasilitasi (%)			v			57,14	-	-	-	-	57,14	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
87	jumlah peserta pertemuan DBHCHT (orang)						75	-	-	-	-	75	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Kegiatan Penerapan pembudidayaan sesuai dengan good agricultural practices tembakau (dbhcht)
88	luas demplot tanaman tembakau (Ha)						2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
89	jumlah bibit tembakau (batang)						100000	-	-	-	-	100000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
90	jumlah pupuk ZA (kg)						600	-	-	-	-	600	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
91	jumlah pupuk NPK (non subsidi)(kg)						800	-	-	-	-	800	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
92	jumlah pupuk organik (kg)						8000	-	-	-	-	8000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
93	jumlah pestisida nabati (liter)						7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
94	jumlah pertemuan persiapan MT 2020 dan perencanaan tanam tembakau (orang)						50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan Penumbuhan dan penguatan kelembagaan (dbhcht)
95	jumlah peserta persiapan MT 2021 dan perencanaan tanam tembakau (orang)						50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
96	jumlah peserta SL GAP Tanaman Tembakau (orang)						100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
97	jumlah peserta pertemuan pengembangan pola kemitraan (orang)						110	-	-	-	-	110	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
98	jumlah peserta pertemuan pelatihan pengolahan pasca panen (orang)						100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
99	Stabilitas Harga Pangan Utama (Beras) (%)			v			-	10	9,8	10	10	-	9,89	9,58	9,19	9,39	-	98,90	97,42	91,86	93,86	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
100	Jumlah Ketersediaan infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (paket)						-	2	2,0	1	-	-	2,00	2	0,00	-	-	100,00	100,00	0,00	-	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
101	Jumlah pertemuan terkait Ketersediaan infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (kali)						-	2	3,0	0	-	-	2,00	3	0,00	-	-	100,00	100,00	-	-	
102	Jumlah Infrastruktur Kawasan Cadangan Pangan Terintegrasi (unit)						-	2	2,0	-	-	-	2,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	
103	Jumlah infrastruktur lumbung yang Tersedia						-	-	-	1	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
104	Jumlah kelompok masyarakat yang terfasilitasi pengembangan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan (kelompok)						-	3	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	Jumlah pertemuan penyediaan infrastruktur logistik (kali)						-	-	3,0	-	-	-	-	2	-	-	-	-	66,67	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
106	Jumlah infrastruktur kemandirian pangan yang tersedia (unit)						-	-	-	-	63	-	-	-	-	59,00	-	-	-	-	-	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
107	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik (laporan)						-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
108	Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH)			v			-	83	84	85,5	86,5	-	83,37	85,8	92,6	93,6	-	100,45	102,14	108,30	-	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
109	Jumlah Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (paket)						-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100,00	100,00	-	-	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
110	Jumlah kelembagaan kelompok tani dan penggilingan padi yang berperan dalam jaringan distribusi dan tersedianya data pangan di Kabupaten Gresik (kelompok)						-	3	1	-	-	-	3	1	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
111	Jumlah Gapoktan /LUPM yang difasilitasi untuk penyediaan dan penyaluran komoditas pangan untuk kemudahan akses pangan masyarakat (gapoktan)						-	10	2	-	-	-	10	2	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
112	Jumlah kelembagaan kelompok tani dan penggilingan padi yang berperan dalam jaringan distribusi dan tersedianya data pangan di Kabupaten Gresik (kelompok)						-	3	1	-	-	-	3	1	-	-	-	100,00	100,00	-	-	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
113	Jumlah Gapoktan /LUPM yang difasilitasi untuk penyediaan dan penyaluran komoditas pangan untuk kemudahan akses pangan masyarakat						-	10	2	-	-	-	10	2	-	-	-	100,00	100,00	-	-	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
114	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di kabupaten gresik						-	2	4	-	-	-	2	2	-	-	-	100,00	50,00	-	-	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
115	jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di kabupaten gresik, jumlah Desa yang diperdayakan melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L)						-	2	4	-	-	-	2	2	-	-	-	100,00	50,00	-	-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
116	Jumlah penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan (laporan)						-	-	-	1	1	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	100,00	-	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
117	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan						-	-	-	2		-	-	-	2,00	-	-	-	-	100,00	-	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
118	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya (laporan)						-	-	-	-	1	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya
119	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan (unit)						-	-	-	-	2	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia
120	Jumlah kelembagaan distribusi pangan (unit)						-	-	-	-	2	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	Pengembangan kelembagaan distribusi pangan kabupaten/kota
121	Informasi harga dan pasokan pangan (dokumen)						-	-	-	-	2	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	Pemantauan harga dan pasokan pangan
122	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (dokumen)						-	-	-	-	2	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
123	Persentase kelompok wanita tani yang diberdayakan (persen)						-	-	-	19	20	-	-	-	19,66	22,47	-	-	-	103,47	-	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
124	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)						-	-	-	1	1	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	100,00	-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
125	Persentase penanganan daerah rawan pangan (%)			v			-	-	12	13	14	-	-	12	13,64	15,79	-	-	100,00	104,55	-	Program Penanganan Kerawanan Pangan
126	Jumlah Peta SKPG / FSVA (dokumen)						-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-		100,00	-	-	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
127	Jumlah Desa rentan rawan pangan yang ditangani (desa)						-	3	3	-	-	-	3	3	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
128	Jumlah Peta SKPG / FSVA (dokumen)						-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
129	Jumlah Desa rentan rawan pangan yang ditangani (desa)						-	3	3	-	-	-	3	3	-	-	-	100,00	100,00	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
130	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar (laporan)						-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
131	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)						-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
132	Informasi desa rawan pangan (laporan)						-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
133	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (dokumen)						-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
134	Jumlah laporan penanganan kerawanan pangan (laporan)						-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota
135	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (dokumen)						-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
136	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (laporan)						-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
137	Persentase Keamanan Pangan Segar (%)			v	v		-	80	80	80	81	-	83,33	83,33	100	100	-	104,17	104,17	125,00	-	Program Pengawasan Keamanan Pangan
138	jumlah sampel sertifikasi keamanan pangan segar (sampel)						-	2	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
139	Jumlah Uji Sampel Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan (paket)						-	-	3	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	100,00	-	-	
140	jumlah sampel sertifikasi keamanan pangan segar (paket)						-	2	0	-	-	-	2,00	0,00	-	-	-	100,00	-	-	-	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
141	Jumlah Uji Sampel Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan (paket)						-	-	3	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	100,00	-	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
142	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar (laporan)						-	-	-	1	3,0	-	-	-	1	3,0	-	-	-	100,00	-	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
143	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)						-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
145	Jumlah rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (dokumen)						-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
146	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (dokumen)						-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota
147	Prosentase realisasi pupuk bersubsidi (%)			v	v		-	95	95,5	96	96,5	-	97,11	99,99	94,2	81,3	-	102,21	104,69	98,13	-	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
148	Prosentase alsintan dalam kondisi baik (%)			v			-	89,98	90,2	90,4	90,7	-	90	91,38	92,4	92,61	-	100,03	101,29	102,13	-	
149	Persentase pemanfaatan alat mesin pertanian yang dapat dimonitoring (%)						-	100,00	100	-	-	-	100,00	100	-	-	-	100,00	100,00	-	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
150	Jumlah Alat Mesin Pertanian yang diadakan (unit)						-	10,00	4	-	-	-	10,00	15	-	-	-	100,00	375,00	-	-	
151	Jumlah Monitoring Pemanfaatan Alsintan (kecamatan)						-	16,00	16	-	-	-	16,00	16	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
152	Jumlah pertemuan pendukung kegiatan (kali)						-	8,00	6	-	-	-	8,00	6	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
153	jumlah kelompok tani penerima hibah (kecamatan)						-	4,00	16	-	-	-	4,00	16	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
154	Jumlah tersedianya biaya operasional pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) di UPT TTP panceng						-	12,00	12	-	-	-	12,00	12,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
155	Jumlah Alat Mesin pertanian yang diadakan						-	10,00	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
156	Jumlah Monitoring Pemanfaatan sarana pertanian						-	16,00	-	-	-	-	16,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	
157	Jumlah pertemuan pendukung kegiatan						-	5,00	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
158	Jumlah Penerima Hibah Alsintan (DBHCHT) (kelompok)						-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100,00	-	-	
159	Jumlah penerima hibah barang (pokir) (kelompok)						-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	100,00	-	-	
160	Jumlah Penerima Hibah Bibit Tembakau Jinten (DBHCHT) (kelompok)						-	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	100,00	-	-	
161	jumlah penerima hibah handspreyer (DBHCHT) (kelompok)						-	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	100,00	-	-	
162	Jumlah penerima Hibah Pupuk Organik Cair (kelompok)						-	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	100,00	-	-	
163	Jumlah Penerima Hibah Pupuk SP36 (DBHCHT) (kelompok)						-	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	100,00	-	-	
164	Jumlah Penerima Hibah Pupuk ZA (DBHCHT) (kelompok)						-	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	100,00	-	-	
165	Jumlah Penerima Hibah Pupuk ZK (DBHCHT) (kelompok)						-	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	100,00	-	-	
166	jumlah pengadaan drone full unit (DBHCHT) (unit)						-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-	
167	Jumlah Peserta Bimtek Pemanfaatan Alsintan (DBHCHT) (orang)						-	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	100,00	-	-	
168	Jumlah peserta FGD (orang)						-	-	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100,00	-	-	
169	Jumlah Peserta Pertemuan Koordiansi & Evaluasi (DBHCHT) (orang)						-	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	100,00	-	-	
170	Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi (DBHCHT) (orang)						-	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	100,00	-	-	
171	Jumlah Peserta Pertemuan Sosialisasi dan Koordinasi Komoditas Jagung (orang)						-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00	-	-	
172	Jumlah peserta sosialisasi penerapan teknologi (DBHCHT) (orang)						-	-	60	-	-	-	-	60	-	-	-	-	100,00	-	-	

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
173	Jumlah kelompok tani penerima hibah						-	4,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
174	Jumlah tersedianya biaya operasional pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) di UPT TTP panceng						-	12,00	12,0	-	-	-	12,00	12,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
175	Jumlah tersedianya biaya operasional pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) di UPT TTP panceng						-	12,00	12,0	-	-	-	12,00	12,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
176	Jumlah Kelompok Ternak Penerima Hibah						-	125	48	-	-	-	123	48,00	-	-	-	98,40	100,00	-	-	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
177	Jumlah pengadaan sarana pembibitan ternak						-	1	1	-	-	-	1	1,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
178	Jumlah pertemuan pendukung kegiatan						-	1	1	-	-	-	1	1,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
179	Jumlah Kelompok Ternak Penerima Hibah						-	125	48,00	-	-	-	123	48,00	-	-	-	98,40	100,00	-	-	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
180	jumlah pengadaan sarana pembibitan ternak						-	1	1,00	-	-	-	1	1,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
181	Jumlah pendukung kegiatan						-	1	1,00	-	-	-	1	1,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
182	Jumlah Pengawasan dan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)						-	-	-	1	17	-	-	-	1	17	-	-	-	100,00	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
183	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)						-	-	-	16	16	-	-	-	16	16	-	-	-	100,00	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
184	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (laporan)						-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian
185	Jumlah kelompok ternak yang dilakukan pengawasan (laporan)						-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
186	Jumlah pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan						-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
187	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (laporan)						-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100,00	-	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
188	Luas lahan LP2B dan LCP2B yang terlindungi (Ha)			v			-	27721	27721	27721	27721	-	27721	27721	27721	27721	-	100,00	100,00	100,00	-	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
189	Persentasi Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Infrastruktur Pertanian (%)			v			-	31,399	32,89	34,375	35,86	-	31,47	31,99	32,59	32,66	-	100,24	97,29	94,81	-	
190	Persentase pengembangan prasarana pertanian yang dapat difasilitasi						-	100	100,00	-	-	-	100	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	Pengembangan Prasarana Pertanian
191	Jumlah pertemuan pendukung kegiatan BK/DAK/DBHCHT/FGD						-	2	3,00	-	-	-	2	5,00	-	-	-	100,00	166,67	-	-	
192	Jumlah pengawasan pembangunan infrastruktur pertanian (paket)						-	2	3,00	-	-	-	2	1,00	-	-	-	100,00	33,33	-	-	
193	Jumlah gapoktan yang menerima hibah sarana produksi pertanian untuk pengelolaan LP2B (paket)						-	-	5,00	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	100,00	-	-	
194	Jumlah pertemuan pendukung kegiatan BK/DAK/DBHCHT/FGD (kali)						-	2	3,00	-	-	-	2	1,00	-	-	-	100,00	33,33	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
195	Jumlah pengawasan Embung (kali)						-	4	-	-	-	-	4	3,00	-	-	-	100,00	-	-	-	
196	Jumlah pengawasan JUT (kali)						-	4	-	-	-	-	4	3,00	-	-	-	100,00	-	-	-	
197	Jumlah kegiatan prasarana pendukung pertanian BK dan DAK yang difasilitasi (kegiatan)						-	-	2,00	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	100,00	-	-	
198	Jumlah Penerima Hibah Mesin Perajang Tembakau (kelompok)						-	-	5,00	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	100,00	-	-	
199	Persentase infrastruktur pertanian terbangun dalam kondisi baik (%)						-	100	100,00	-	-	-	100	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	Pembangunan Prasarana Pertanian
200	Jumlah jaringan irigasi yang terbangun (unit)						-	1	1,00	-	-	-	0	4,00	-	-	-	0,00	400,00	-	-	
201	Jumlah pengawasan jaringan irigasi tersier (paket)						-	1	1,00	-	-	-	0	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
202	Jumlah embung yang di bangun (unit)						-	4	4,00	-	-	-	4	0,00	-	-	-	100,00	0,00	-	-	
203	Jumlah Jalan Usaha Tani yang di bangun (Dana DAK) (unit)						-	4	5,00	-	-	-	4	2,00	-	-	-	100,00	40,00	-	-	
204	Jumlah Jalan Usaha Tani yang di bangun (Dana BK Kepada Desa) (unit)						-	80	65,00	-	-	-	80	65,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
205	Jumlah pembangunan ruang data BPP (unit)						-	15	3,00	-	-	-	15	3,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
206	Jumlah Irigasi air tanah dangkal/dalam yang di bangun (unit)						-	12	2,00	-	-	-	12	2,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
207	Jumlah long storage (unit)						-	1	0,00	-	-	-	1	0,00	-	-	-	100,00	-	-	-	
208	Jumlah fasilitasi pemeliharaan dan operasional kantor TTP Panceng (bulan)						-	12	12,00	-	-	-	12	12,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
209	Jumlah pembangunan infrastruktur TTP (unit)						-	1	3,00	-	-	-	1	1,00	-	-	-	100,00	33,33	-	-	
210	Jumlah embung yang di bangun						-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100,00	-	-	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Embung Pertanian
211	Jumlah Jalan Usaha Tani yang di bangun (Dana DAK)						-	4	2,00	-	-	-	4	2,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani
212	Jumlah Jalan Usaha Tani yang di bangun (Dana BK Kepada Desa)						-	80	-	-	-	-	80	-	-	-	-	100,00	-	-	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (UPT TTP PANCENG))
213	Jumlah pembangunan ruang data BPP (unit)						-	15	3,00	-	-	-	15	3,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
214	Jumlah Irigasi air tanah dangkal/dalam yang di bangun (unit)						-	12	6,00	-	-	-	12	6,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
215	Jumlah long storage						-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00		-	-	
216	Jumlah fasilitasi pemeliharaan dan operasional kantor TTP Panceng						-	12	12,00	-	-	-	12	12,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
217	Jumlah pembangunan infrastruktur TTP (paket)						-	1	1,00	-	-	-	1	1,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
218	DED RPH (paket)						-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	100,00	-	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
219	Luas lahan yang divalidasi (dokumen)						-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	Pengembangan Prasarana Pertanian
220	Jumlah peta LP2B (dokumen)						-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	
221	Jumlah pengawasan pembangunan prasarana pendukung pertanian (laporan)						-	-	-	1,0	2,0	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-	100,00	-	
222	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (laporan)						-	-	-	1,0	2,0	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-	100,00	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
223	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (unit)						-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,00	-	-	-	0,00	-	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen perkebunan
224	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)						-	-	-	9,0	24,0	-	-	-	9,00	9,00	-	-	-	100,00	-	Pembangunan Prasarana Pertanian
225	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)						-	-	-	3,0	4,0	-	-	-	3,00	4,00	-	-	-	100,00	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
226	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)						-	-	-	6,0	4,0	-	-	-	6,00	4,00	-	-	-	100,00	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
227	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (unit)						-	-	-	-	15,0	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
228	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (unit)						-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
229	Persentase kondisi ternak sehat (%)			v			-	87,5	87,7	87,9	88,2	-	87,13	87,91	87,94	88,34	-	99,61	100,23	100,02	-	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
230	Jumlah Obat pencegahan penyakit ternak (jenis)						-	21	1,0	-	-	-	21	1,0	-	-	-	100,00	100,00	-	-	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
231	Jumlah peralatan pemeliharaan kesehatan ternak (jenis)						-	8	1,0	-	-	-	8	1,0	-	-	-	100,00	100,00	-	-	

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
232	ketersediaan Jumlah vaksin pencegahan penyakit ternak (jenis)						-	12	2,0	-	-	-	12	2,0	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
233	Jumlah pelayanan kesehatan hewan (kali)						-	3	3,0	-	-	-	3	3,0	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
234	Jumlah vaksin pencegahan penyakit ternak (jenis)						-	10	1,0	-	-	-	10	1,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (UPT Puskesmas Panceng)
235	Jumlah vaksin pencegahan penyakit ternak (jenis)						-	12	1,0	-	-	-	12	1,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (UPT Puskesmas Balongpanggang)
236	Jumlah Obat pencegahan penyakit ternak (jenis)						-	21	1,0	-	-	-	21	1,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
237	Jumlah peralatan pemeliharaan kesehatan ternak (jenis)						-	8	1,0	-	-	-	8	1,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
238	Jumlah Hasil Pemeriksaan Laboratorium bahan asal hewan (sampel)						-	24	36,0	-	-	-	24	-	-	-	-	100,00	-	-	-	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
239	Jumlah obat-obatan untuk kesehatan ternak (jenis)						-	8	1,0	-	-	-	8	-	-	-	-	100,00	-	-	-	
240	Jumlah pengadaan sarana pendukung						-	-	1,0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
241	Jumlah pendampingan kegiatan						-	-	3,0	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
242	Jumlah pengadaan sarana pendukung						-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
243	Jumlah pendampingan kegiatan						-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
244	Jumlah Hasil Pemeriksaan Laboratorium bahan asal hewan (sampel)						-	24	36,0	-	-	-	24	-	-	-	-	100,00	-	-	-	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
245	Jumlah obat-obatan untuk kesehatan ternak (jenis)						-	8	1,0	-	-	-	8	-	-	-	-	100,00	-	-	-	
246	Jumlah kecamatan yang difasilitasi penanganan wabah penyakit						-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	100,00	-	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
247	Jumlah laporan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular (laporan)						-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
248	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (laporan)						-	-	-	3,00	12,00	-	-	-	3,00	12	-	-	-	100,00	-	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
249	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner						-	-	-	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	100,00	-	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
250	Jumlah pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner (laporan)						-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
251	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (laporan)						-	-	-	3,00	2,00	-	-	-	3,00	2	-	-	-	100,00	-	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
252	Jumlah unit usaha yang mengikuti pendampingan						-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	100,00	-	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
253	Jumlah jenis produk hewan yang diawasi						-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	100,00	-	
254	Jumlah penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner (laporan)						-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
255	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (laporan)						-	-	-	12,00	12,00	-	-	-	12,00	12	-	-	-	100,00	-	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
256	Jumlah pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner (dokumen)						-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
257	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (unit usaha)						-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
258	Jumlah pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan (laporan)						-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota
259	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)						-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan media

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						<i>pembawa penyakit hewan lainnya (HPM)</i>
260	Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (%)			v			-	81,41	81,82	82,23	82,64	-	83	74,87	80,51	100	-	101,96	91,50	97,92	-	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
261	Jumlah Pertemuan Pendukung Kegiatan (kali)						-	13,00	-	-	-	-	13,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
262	Jumlah bantuan saprodi pertanian (paket)						-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	
263	Jumlah Gerakan Pelestarian Musuh Alami, Pengendalian Penyakit dan HamaTanaman (kecamatan)						-	17,00	-	-	-	-	17,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	
264	Jumlah Pengembangan kawasan pangan dan non pangan (kelompok)						-	3,00	1	-	-	-	3,00	1	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
265	Jumlah Obat tanaman perkebunan (paket)						-	1,00	1	-	-	-	1,00	1	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
266	Jumlah sarana penanggulangan pasca bencana alam (paket)						-	1,00	1	-	-	-	1,00	1	-	-	-	100,00	100,00	-	-	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
267	Jumlah Pertemuan Pendukung Kegiatan (kali)						-	4,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	
268	Jumlah bantuan saprodi tanaman pangan dan hortikultura (paket)						-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	
269	Jumlah Gerakan Pelestarian Musuh Alami, Pengendalian Penyakit dan HamaTanaman (kecamatan)						-	17,00	-	-	-	-	17,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	
270	Jumlah Pengembangan kawasan pangan dan non pangan (kelompok)						-	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	
271	Jumlah Pertemuan Pendukung Kegiatan (kali)						-	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	
272	Jumlah pengadaan sarana produksi (paket)						-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
273	Jumlah Pertemuan Pendukung Kegiatan (kali)						-	2,00	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	
274	Jumlah Obat tanaman perkebunan (paket)						-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	
275	Jumlah sarana penanggulangan pasca bencana alam (paket)						-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	
276	Jumlah pertemuan pendukung kegiatan (kali)						-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	
277	Jumlah Denfarm Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tembakau						-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-	
278	Jumlah Hard Drive Eksternal						-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100,00	-	-	
279	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Serealia						-	-	60	-	-	-	-	60	-	-	-	-	100,00	-	-	
280	Jumlah Kajian Penerapan Inovasi Teknologi Pengendalian OPT Ramah Lingkungan pada Budidaya Tanaman Tembakau						-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-	
281	Jumlah Personal Komputer						-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-	
282	Jumlah Pertemuan Adopsi Teknologi Pengendalian OPT Tembakau menggunakan Pestisida Nabati						-	-	60	-	-	-	-	60	-	-	-	-	100,00	-	-	
283	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pembibitan						-	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	100,00	-	-	
284	Jumlah Peserta FGD Pengendalian OPT tanaman pangan, horti dan perkebunan						-	-	44	-	-	-	-	44	-	-	-	-	100,00	-	-	
285	Jumlah Peserta FGD Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan						-	-	44	-	-	-	-	44	-	-	-	-	100,00	-	-	
286	Jumlah Peserta Gerakan Pengendalian OPT						-	-	306	-	-	-	-	306	-	-	-	-	100,00	-	-	
287	Jumlah Peserta Pertemuan Adopsi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu untuk meningkatkan produksi tembakau						-	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	100,00	-	-	

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
288	Jumlah Peserta Pertemuan dalam rangka Pendataan Komoditas Tembakau						-	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	100,00	-	-	
289	Jumlah Peserta Pertemuan Mekanisasi Usaha Tani Tembakau dan Penghitungan Analisa Usaha Tani Tembakau						-	-	70	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100,00	-	-	
290	Jumlah Peserta Pertemuan Penerapan PHT dan Pengendalian OPT						-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00	-	-	
291	Jumlah Peserta Pertemuan Perbanyak Agens Hayati						-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	100,00	-	-	
292	Jumlah Peserta Pertemuan SLPHT Tanaman Tembakau						-	-	300	-	-	-	-	300	-	-	-	-	100,00	-	-	
293	Jumlah Peserta Pertemuan Teknis Antisipasi Dampak Anomali Iklim						-	-	200	-	-	-	-	200	-	-	-	-	100,00	-	-	
294	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tanaman Pangan						-	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	100,00	-	-	
295	Jumlah Rubuha						-	-	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100,00	-	-	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
296	Jumlah pertemuan pendukung kegiatan (kegiatan)						-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	100,00	-	-	
297	Jumlah peserta pertemuan koordinasi pengendalian hama pada tanaman perkebunan (orang)						-	-	60	-	-	-	-	60	-	-	-	-	100,00	-	-	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
298	Jumlah peserta pertemuan mekanisasi tanaman perkebunan (orang)						-	-	60	-	-	-	-	60	-	-	-	-	100,00	-	-	
299	Jumlah peserta pertemuan pendataan tanaman tahunan (Bawean) (orang)						-	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	100,00	-	-	
300	Jumlah sarana pendukung produksi yang diadakan (paket)						-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	100,00	-	-	
301	Jumlah peserta pertemuan FGD Optimalisasi Tanaman Perkebunan (orang)						-	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	100,00	-	-	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
302	Jumlah kelompok tani yang difasilitasi						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303	Jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota (laporan)						-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
304	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)						-	-	-	1044,45	1043,00	-	-	-	295,6	2312,6	-	-	-	-	-	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
305	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (ha)						-	-	-	3169,6	5496,00	-	-	-	1030,6	8,00	-	-	-	-	-	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
306	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)						-	-	-	52,00	-	-	-	-	52	-	-	-	-	100,00	-	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
307	Persentase usaha pertanian yang memiliki izin (persen)			v			-	12,5	25	37,5	50	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	Program Perizinan Usaha Pertanian
308	Jumlah rekomtek izin usaha pertanian yang diterbitkan (dokumen)						-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota
309	Jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian (dokumen)						-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian
310	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (laporan)						-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian
311	Jumlah rekomtek izin usaha peternakan yang diterbitkan (laporan)						-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, Rumah Potong Hewan
312	Jumlah izin usaha unit rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktik dokter hewan mandiri/puskesmas mandiri, tempat pelayanan paramedik veteriner atau pasar hewan yang diawasi (laporan)						-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	Pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktik dokter hewan mandiri/puskesmas mandiri, tempat pelayanan paramedik veteriner atau pasar hewan
313	Persentase penyuluh bersertifikat (%)			v			-	26,23	31,15	36,07	40,98	-	27,12	43,64	48	88,68	-	103,39	140,10	133,09	-	Program Penyuluhan Pertanian
314	Persentase kelompok tani dengan klasifikasi Madya (%)			v			-	11,60	13,04	14,48	15,92	-	11,60	13,49	14,23	16,65	-	100,00	103,44	98,30	-	
315	Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian (kali)						-	233	204	-	-	-	229	192	-	-	-	98,28	94,12	-	-	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
316	Jumlah Programa Pertanian yang disusun (kecamatan)						-	16	16	-	-	-	16	16	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
317	Jumlah kelompok yang di nilai untuk penilaian kelas kelompok (kelompok)						-	48	40	-	-	-	48	40	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
318	Jumlah Rekapitulasi Database Sosial Ekonomi Terpadu Petani (gapoktan)						-	-	308	-	-	-	-	302	-	-	-	-	98,05	-	-	
319	Jumlah Media Penyuluhan yang dapat disediakan (jenis)						-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100,00	-	-	
320	Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian yang diselenggarakan						-	2	3	-	-	-	2	3	-	-	-	100,00	100,00	-	-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
321	Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas Petani tanam pangan, hortikultura, biofarmaka dan perkebunan						-	39	-	-	-	-	39	-	-	-	-	100,00	-	-	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
322	Jumlah BPP yang mendapat alokasi DAK Non Fisik						-	-	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-	100,00	-	-	
323	Jumlah program yang disusun						-	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-	100,00	-	-	-	
324	Jumlah kelompok yang dinilai						-	48	-	-	-	-	48	-	-	-	-	100,00	-	-	-	
325	jumlah rapat koordinasi penyusunan media penyuluhan						-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-	-	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
326	jumlah pertemuan latihan, kunjungan dan supervisi						-	192	-	-	-	-	192	-	-	-	-	100,00	-	-	-	
327	Jumlah demplot yang difasilitasi (DBHCHT) (kelompok)						-	-	18	-	-	-	-	18	-	-	-	-	100,00	-	-	
328	Jumlah Gapoktan yang mendapatkan insentif (gapoktan)						-	-	308	-	-	-	-	308	-	-	-	-	100,00	-	-	
329	Jumlah kelompok yang di nilai untuk penilaian kelas kelompok (kelompok)						-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	100,00	-	-	
330	Jumlah pelatihan pengolahan pasca panen (DBHCHT) (kali)						-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100,00	-	-	
331	Jumlah penelitian yang dilaksanakan (DBHCHT) (paket)						-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100,00	-	-	

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
332	Jumlah pertemuan e rdck tingkat kabupaten (kali)						-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100,00	-	-	
333	Jumlah Pertemuan Penyusunan SOP Budidaya Tembakau (DBHCHT) (kali)						-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100,00	-	-	
334	Jumlah peserta Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tembakau (DBHCHT) (orang)						-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	100,00	-	-	
335	Jumlah peserta Pertemuan Penentuan Grade Tanaman Tembakau (DBHCHT) (orang)						-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	100,00	-	-	
336	Jumlah peserta Pertemuan Pengembangan Pola Kemitraan dengan Daerah Lain (DBH CHT) (orang)						-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	100,00	-	-	
337	Jumlah peserta Pertemuan Perencanaan Tanaman Tembakau Tahun 2023 (DBHCHT) (orang)						-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00	-	-	
338	Jumlah peserta Temu Lapang (DBH CHT) (orang)						-	-	120	-	-	-	-	120	-	-	-	-	100,00	-	-	
339	Jumlah Program yang disusun (kecamatan)						-	-	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-	100,00	-	-	
340	Jumlah rapat koordinasi (DBH CHT) (kali)						-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100,00	-	-	
341	Jumlah Sekolah Lapang Tahap Penumbuhan (DBH CHT) (kali)						-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	100,00	-	-	
342	Jumlah BPP yang mendapat Alokasi DAK Fisik						-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100,00	-	-	
343	Jumlah data penerima Gotani						-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-	
344	Jumlah FGD						-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-	
345	Jumlah pertemuan latihan, kunjungan dan supervisi						-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	100,00	-	-	
346	Jumlah peserta pelatihan pengoperasian pesawat tanpa awak sektor pertanian						-	-	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100,00	-	-	
347	Jumlah BPP yang mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan (unit)						-	-	-	16	16	-	-	-	16	16	-	-	-	100,00	-	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
348	Jumlah kelompok tani yang meningkat kelasnya (poktan)						-	-	-	40	40	-	-	-	40	40	-	-	-	100,00	-	
349	Jumlah kelompok tani yang mengikuti sekolah lapang (poktan)						-	-	-	40	40	-	-	-	40	40	-	-	-	100,00	-	

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
350	Jumlah kelompok tani yang difasilitasi kartu Go Tani (poktan)						-	-	-	-	293	-	-	-	-	304	-	-	-	-	-	
351	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)						-	-	-	16	16	-	-	-	16	16	-	-	-	100,00	-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
352	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)						-	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
353	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (unit)						-	-	-	-	2	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
354	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi (unit)						-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota
355	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (orang)						-	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	Penyediaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian
356	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)						-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota
357	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (dokumen)						-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian

Kinerja anggaran Dinas Pertanian juga menunjukkan capaian kinerja yang baik, dimana penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan secara keseluruhan menunjukkan capaian kinerja yang baik (Tabel 2.4). Selain itu, kinerja pendapatan daerah yang dihasilkan dari hasil retribusi Rumah Pemetongan Hewan juga menunjukkan peningkatan (Tabel 2.5)

Tabel 2.4. Kinerja Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
2020	22.209.546.818	21.160.304.969	95,27
2021	39.243.612.949	35.853.292.354	91,36
2022	38.028.653.838	31.400.570.124	82,57
2023	31.258.082.941	28.927.345.212	92,54
2024	51.038.494.339	46.338.488.334	90,79

Kinerja anggaran Dinas Pertanian tahun 2020 (Capaian 95,27%) menunjukkan pelaksanaan program sangat baik, sehingga mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif. Tahun 2021 (Capaian 91,36%) menunjukkan pelaksanaan program relatif baik, walaupun terdapat deviasi sekitar 8,64%. Tahun 2022 (Capaian 82,57%) merupakan penurunan capaian paling rendah dalam periode ini, dimana realisasi turun signifikan dibanding target. Indikasinya adalah adanya hambatan, misalnya keterbatasan anggaran, serapan program yang lambat, atau kondisi eksternal (ekonomi global, pandemi, inflasi). Tahun 2023 (Capaian 92,54%) menunjukkan kinerja membaik kembali, capaian di atas 90%, dimana realisasi hampir mendekati target. Hal ini menunjukkan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan dibanding 2022. Tahun 2024 (Capaian 90,79%) target meningkat tajam dan realisasi juga tinggi. Meskipun capaian sedikit di bawah 2023, tetap tergolong baik (>90%), apalagi dengan skala target yang lebih besar. Analisis Tren dari capaian kinerja anggaran tersebut adalah rata-rata capaian 2021–2024 yaitu sekitar 89%, tahun terlemah yakni terjadi pada tahun 2022 (82,57%) dan tahun terbaik terjadi pada tahun 2023 (92,54%). Secara umum, capaian konsisten mendekati target, menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran cukup baik. Namun, adanya fluktuasi (khususnya 2022) menunjukkan masih ada tantangan dalam konsistensi serapan anggaran. Catatan strategis dari capaian kinerja anggaran tersebut

adalah perlu evaluasi penyebab rendahnya capaian 2022 agar tidak terulang. Tahun 2024 menunjukkan kemampuan mengelola target besar, meskipun capaian sedikit menurun namun hal ini bisa ditingkatkan dengan perencanaan dan monitoring lebih ketat. Secara keseluruhan, kinerja anggaran tahun 2021–2024 tergolong baik (di atas 85%), dengan kecenderungan mampu menjaga realisasi mendekati target.

Tabel 2.5. Kinerja Pendapatan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
2020	123.718.000	112.643.000	91,05
2021	130.000.000	116.619.000	89,71
2022	130.000.000	124.942.000	96,11
2023	115.000.000	121.648.000	105,78
2024	115.000.000	177.624.000	154,46

Kinerja pendapatan Dinas Pertanian Tahun 2020 (Capaian 91,05%) menunjukkan capaian yang tergolong baik. Tahun 2021 (Capaian 89,71%) realisasinya lebih rendah dari target, capaian di bawah 90%. Hal ini menunjukkan adanya hambatan di awal periode, baik dari sisi pelaksanaan maupun dukungan sumber daya. Tahun 2022 (Capaian 96,11%) kinerja meningkat dibanding 2021. Realisasi sudah hampir menyamai target, hanya selisih tipis. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan efektivitas dan serapan. Tahun 2023 (Capaian 105,78%) realisasi melampaui target, capaian di atas 100%. Indikasi target ditetapkan lebih rendah dari potensi riil, atau terdapat faktor pendorong yang kuat di lapangan (misalnya peningkatan permintaan, dukungan program tambahan, atau efisiensi pelaksanaan). Tahun 2024 (Capaian 154,46%) realisasi melonjak jauh melampaui target. Capaian lebih dari 1,5 kali target. Hal ini menunjukkan adanya lonjakan kinerja yang luar biasa. Hal ini bisa berarti target terlalu konservatif atau memang ada tambahan faktor eksternal (subsidi, pasar, atau kebijakan baru) yang mendorong pencapaian. Analisis Tren dari capaian kinerja pendapatan tersebut adalah rata-rata capaian 2021–2024 sekitar 111,5%. Tahun terlemah yakni 2021 (89,71%) dan tahun terbaik yakni 2024 (154,46%). Ada tren perbaikan yang jelas dari tahun ke tahun dan hal ini menunjukkan peningkatan kapasitas, efektivitas program, dan mungkin juga dukungan sumber

daya. Catatan Strategis dari capaian kinerja penapatan tersebut diantaranya kinerja 2021–2022 masih wajar (sedikit di bawah hingga mendekati target), tahun 2023–2024 menunjukkan lonjakan sehingga evaluasi perlu dilakukan apakah ini indikasi target kurang realistis atau memang ada kemajuan signifikan di lapangan. Jika capaian >150% terjadi berulang, maka metode penetapan target perlu disesuaikan agar lebih akurat mencerminkan potensi sebenarnya.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sasaran penerima program dan kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik yakni Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani. Sesuai Surat Keputusan Bupati Gresik jumlah kelompok tani di Kabupaten Gresik yaitu 1075 kelompok sedangkan jumlah gabungan kelompok tani 302 kelompok. Berdasarkan peraturan menteri pertanian no. 67 tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani disebutkan bahwa kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi nonformal pedesaan yang dibutuhkan perkembangannya dari petani, oleh petani, dan untuk petani. Banyaknya kelembagaan kelompok tani di Kabupaten Gresik perlu dimaksimalkan keberadaan sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi petani. Kelompok tani harus mampu menjalankan fungsi dan perannya tanpa bergantung dengan arahan dari penyuluh. Menurut Peraturan Menteri Pertanian No 67 Tahun 2016, kelompok tani mempunyai fungsi sebagai kelas belajar, wahana kerja sama, dan unit produksi.

Penguatan tata kelola dan kelembagaan diperlukan agar kelompok tani mempunyai inisiatif dan mampu menjalankan fungsinya dengan optimal. Tata kelola dan kelembagaan yang baik akan membuat kelompok tani mempunyai kesadaran melakukan kegiatan pembelajaran yang diperlukan bagi anggotanya secara mandiri. Kelompok tani juga akan mampu memaksimalkan kerja sama yang terjalin antar petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Selain kelompok tani, kelembagaan petani yang dimaksud pada Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016 adalah gabungan kelompok tani (Gapoktan). Gapoktan merupakan kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Peran dan fungsi gapoktan meliputi wahana kerja sama, unit produksi, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro.

2.1.5 Mitra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Pertanian Kabupaten Gresik hingga saat ini belum memiliki mitra resmi dalam penyelenggaraan pelayanan. Seluruh program dan kegiatan masih dilaksanakan secara mandiri oleh perangkat daerah dengan mengandalkan sumber daya internal yang tersedia. Ketiadaan mitra ini sekaligus membuka peluang untuk menjalin kerja sama di masa mendatang, baik dengan lembaga pemerintah lain, dunia usaha, maupun organisasi masyarakat. Kolaborasi dengan mitra diharapkan dapat memperkuat kapasitas pelayanan, memperluas jangkauan manfaat, serta mendorong efektivitas pencapaian tujuan pembangunan pertanian di Kabupaten Gresik.

2.1.6 Dukungan BUMN/BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

1. PT. Petrokimia Gresik

PT Petrokimia Gresik berkontribusi melalui penyaluran pupuk bersubsidi. Mekanisme distribusi pupuk dilakukan secara berjenjang, dimulai dari penyaluran oleh produsen ke distributor, dilanjutkan ke kios resmi, hingga akhirnya sampai ke kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan). Skema ini memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dapat diakses oleh petani secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

2. Perum Bulog

Dinas Pertanian secara berkala melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga dan memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyediakan komoditas pangan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga di bawah harga pasar. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah bekerja sama dengan Perum Bulog yang memastikan ketersediaan pangan pokok, khususnya beras, melalui penyediaan stok dari gudang Bulog yang kemudian didistribusikan ke masyarakat.

3. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)

PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang mendukung melalui pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Program ini memberikan perlindungan kepada petani dari risiko kerugian akibat banjir, kekeringan, maupun serangan organisme pengganggu tanaman. Kehadiran

Jasindo dalam program AOTP tidak hanya meningkatkan rasa aman petani dalam menjalankan usaha taninya, tetapi juga mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian dan stabilitas ketahanan pangan.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Dinas Pertanian Kabupaten Gresik hingga saat ini belum memiliki kerja sama daerah. Seluruh kegiatan dan program masih dilaksanakan secara mandiri melalui optimalisasi sumber daya internal yang tersedia. Ketiadaan kerja sama ini sekaligus membuka peluang di masa mendatang untuk menjalin sinergi dengan pemerintah daerah lain, baik dalam lingkup regional maupun nasional. Melalui kerja sama antardaerah, diharapkan akan terbangun dukungan yang lebih kuat dalam pengembangan sektor pertanian, peningkatan kapasitas pelayanan, serta pencapaian tujuan pembangunan pertanian secara lebih efektif dan berkelanjutan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Gresik tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan yang masih dihadapi hingga saat ini. Di sisi lain, dinamika kebutuhan masyarakat terhadap pangan yang terus meningkat menuntut adanya pelayanan publik yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan pertanian di masa mendatang.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan sektor pertanian merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan sektor pertanian. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan gap kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Secara lebih rinci, permasalahan pembangunan sektor pertanian antara lain:

1. Lahan pertanian di Kabupaten Gresik semakin terbatas akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan industri dan perumahan.

2. Perubahan iklim dan cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan dapat berdampak negatif pada produksi pangan.
3. Kebutuhan kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk kekeringan, banjir, dan perubahan suhu yang dapat mempengaruhi hasil panen dan produktivitas.
4. Keterbatasan akses ke teknologi modern dan praktik pertanian yang efisien.
5. Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura meningkat namun pengukuran kualitas kesejahteraan petani belum dilaksanakan sehingga intervensi kebijakan dalam urusan ini masih belum partisipatif dan incremental.
6. Produktivitas dan regenerasi tanaman perkebunan kurang optimal.
7. Regenerasi petani kurang berjalan optimal, dimana jumlah petani muda terbatas dan lebih didominasi petani generasi tua.
8. Keterbatasan bahan pakan lokal serta ancaman penyakit ternak menular (PMK, Flu Burung, Antraks), limbah peternakan belum dikelola dengan optimal.
9. Sistem distribusi dan rantai pasok pangan yang kurang efisien dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan permintaan pangan, harga pangan cenderung fluktuatif, diversifikasi pangan lokal kurang optimal, serta belum berkembangnya hilirisasi pangan.

2.2.2. Isu Strategis

Kabupaten Gresik sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur memegang peranan penting dalam pembangunan regional maupun nasional. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional serta statusnya sebagai kawasan industri besar menjadikan Gresik sebagai motor penggerak ekonomi. Namun, perkembangan pesat tersebut juga membawa sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi melalui perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, salah satunya penguatan ketahanan pangan. Berdasarkan hasil identifikasi maka Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dirumuskan sebagaimana tersaji pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS PERTANIAN	PERMASALAHAN DINAS PERTANIAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERTANIAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERTANIAN			ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pertanian	Lahan pertanian di Kabupaten Gresik semakin terbatas akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan industri dan perumahan.	Perlunya perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dan penerapan pertanian ramah lingkungan untuk menjaga daya dukung lahan.	Perubahan iklim memicu ketidakpastian musim tanam dan risiko gagal panen.	Pemerintah pusat menargetkan swasembada pangan	Pertumbuhan Kawasan industri di Gresik berdampak pada penyempitan lahan sawah.	Perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peningkatan produktivitas melalui mekanisasi dan smart farming, Penguatan kelembagaan petani, Program petani muda
	Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura meningkat namun pengukuran kualitas kesejahteraan petani belum dilaksanakan sehingga intervensi kebijakan dalam urusan ini masih belum partisipatif dan incremental.					
	Keterbatasan akses ke teknologi modern					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS PERTANIAN	PERMASALAHAN DINAS PERTANIAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERTANIAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERTANIAN			ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	dan praktik pertanian yang efisien.					
	Regenerasi petani kurang berjalan optimal, dimana jumlah petani muda terbatas dan lebih didominasi petani generasi tua.					
	Kebutuhan kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk kekeringan, banjir, dan perubahan suhu yang dapat mempengaruhi hasil panen dan produktivitas.					
Perkebunan	Produktivitas dan regenerasi tanaman perkebunan kurang optimal	Pemanfaatan biomassa tebu sebagai energi terbarukan dan	Tren bioenergi dunia mendorong kebutuhan tebu untuk etanol.	Program swasembada gula yang menuntut revitalisasi	Keberadaan industri gula di Jawa Timur mendorong	Revitalisasi perkebunan tebu, diversifikasi produk (gula, bioenergi),

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS PERTANIAN	PERMASALAHAN DINAS PERTANIAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERTANIAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERTANIAN			ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		pengelolaan lingkungan kebun.		perkebunan.	kebutuhan bahan baku tebu dari Gresik.	dan peningkatan kesejahteraan pekebun melalui kemitraan dengan industri.
Peternakan	Keterbatasan bahan pakan lokal, ancaman penyakit hewan menular (PMK, flu burung, antraks), Limbah peternakan belum dikelola optimal.	Kesehatan lingkungan melalui pengelolaan limbah ternak dan pengendalian penyakit zoonosis.	Meningkatnya isu keamanan pangan dan keamanan hayati (zoonosis).	Target swasembada daging sapi dan program pengendalian PMK.	Gresik dekat dengan pasar besar (Surabaya, Jabodetabek) sehingga peluang pemasaran produk ternak tinggi.	Pengembangan pakan berbasis lokal, Biosekuriti peternakan, Integrasi peternakan–pertanian (misalnya pupuk organik dari limbah).
Ketahanan Pangan	Harga pangan cenderung fluktuatif, diversifikasi pangan lokal kurang optimal, belum berkembangnya hilirisasi pangan, sistem distribusi dan rantai pasok pangan	Diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan pangan impor.	Krisis pangan global akibat konflik geopolitik dan perubahan iklim.	Gerakan diversifikasi pangan lokal	Perubahan pola konsumsi masyarakat	Stabilisasi harga pangan, Diversifikasi pangan lokal, Pengembangan Hilirisasi pangan.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS PERTANIAN	PERMASALAHAN DINAS PERTANIAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERTANIAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERTANIAN			ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	yang kurang efisien dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan permintaan pangan.					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Pembangunan pertanian Kabupaten Gresik dalam 5 tahun kedepan berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, dimana RPJMD tersebut sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik Terpilih, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah **Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 maka dirumuskan Misi pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah selama periode 2025-2029. Rumusan Misi pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 3.1. Misi Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Misi Pertama	Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah
Misi Kedua	Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Misi Ketiga	Menyelaraskan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Misi Keempat	Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi masyarakat
Misi Kelima	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dinas Pertanian Kabupaten Gresik bertanggung jawab untuk melaksanakan Misi Kedua dan Misi Kelima. Berdasarkan Misi Kedua ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi daerah yang berdaya saing dan Sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi ekonomi lokal. Selain itu, berdasarkan Misi Kelima ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan Sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas diberbagai aspek kesejahteraan dan Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan dan Menghapus Ketimpangan Social Ekonomi. Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut maka Dinas Pertanian Kabupaten Gresik menetapkan Tujuan Renstra dan Sasaran Renstra sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2. Tujuan pembangunan sektor pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dirumuskan untuk menjawab isu-isu strategis sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Gresik. Untuk mewujudkan Tujuan Renstra tersebut, ditetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025–2029. Sasaran Renstra adalah penjabaran lebih spesifik dari tujuan, bersifat terukur, kuantitatif, dan kualitatif serta menunjukkan target kinerja yang akan dicapai setiap tahun hingga akhir periode Renstra.

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1		Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian		Rasio Net Ekspor (%)				10,77-11,80	10,80-12,00	10,84-12,20	10,87-12,40	10,91-12,60	10,94-12,80	
2				Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)				48	46	44	42	40	38	
3				Rasio Gini (Angka)				0,311-0,351	0,303-0,343	0,295-0,335	0,287-0,327	0,279-0,319	0,271-0,311	
4				Indeks Pemerintah Digital (Angka)				4,37	1,79-2,1	1,89-2,25	1,99-2,39	2,09-2,54	2,19-2,68	
5				Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Predikat)				A	A	A	AA	AA	AA	
6				Indeks Sistem Merit (Angka)				315	330	345	360	375	390	
7				Indeks Pelayanan Publik (Indeks)				2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
8	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal		Meningkatnya produksi sektor pertanian	Pertumbuhan produksi komoditas unggulan pertanian (%)		√		0,46	0,46	0,47	0,47	0,48	0,48	
9				Pertumbuhan produksi komoditas unggulan perkebunan (%)		√		0,45	0,48	0,52	0,55	0,59	0,62	

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
10				Pertumbuhan produksi komoditas unggulan peternakan (%)		√		1,85	1,87	1,90	1,92	1,94	1,97	
11	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan		Meningkatnya ketahanan pangan	Rasio ketersediaan pangan per kapita (kg/kapita/th)		√		184,88	185,73	186,59	187,46	188,36	189,27	
12				Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)		√		94,17	94,75	95,32	95,89	96,46	97,04	
13				Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	√			2,88	2,85	2,83	2,80	2,78	2,75	
14				Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)		√		80,61	81,32	82,03	82,75	83,46	84,17	
15	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi		Meningkatnya pengendalian inflasi sektor pertanian	Stabilitas Harga Pangan Utama (%)		√		4,68	4,68	4,70	4,72	4,74	4,77	

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
16			Meningkatnya kesejahteraan petani	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (%)	√		√	0,73-2,30	0,85-2,60	0,92-2,90	0,99-3,20	1,03-3,50	1,20-3,70	

Tabel 3.3. Penahapan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sub-sektor tanaman pangan: • Alsintan, pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur (normalisasi waduk) • Pengembangan kawasan, Diversifikasi produk/komoditas nilai tinggi, peningkatan kapabilitas petani melalui program pelatihan, SOP budidaya • Penanganan/teknologi pasca panen, diversifikasi pengolahan, fasilitas penyimpanan, pengolahan (packing house) dan sertifikasi produk, program promosi produk • Pengolahan limbah hasil kegiatan pertanian, pendampingan kelembagaan petani, peningkatan kapabilitas dan kuantitas penyuluh,	Sub-sektor tanaman pangan: • Alsintan, implementasi teknologi baru, pemantauan normalisasi waduk • Pengembangan kawasan, pelatihan lanjutan, pengembangan produk bernilai tambah • Monev, fasilitas penyimpanan dan pengolahan (packing house), pengembangan rantai distribusi (mengurangi ketergantungan tengkulak) • Pengolahan limbah hasil kegiatan pertanian, pendampingan kelembagaan petani, pembentukan badan usaha milik petani/desa, peningkatan kapabilitas dan kuantitas penyuluh	Sub-sektor tanaman pangan: • Alsintan, implementasi teknologi baru, penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi waduk • Pengembangan kawasan, SOP Budidaya intensif, optimalisasi penggunaan lahan • Monev, pengembangan produk olahan, pemasaran produk ke pasar yang lebih luas, sertifikasi yang lebih lengkap untuk peningkatan usaha • Pengolahan limbah hasil kegiatan pertanian, pendampingan kelembagaan petani, optimalisasi badan usaha milik petani/desa, peningkatan kapabilitas dan kuantitas penyuluh, Inisiasi Kemitraan	Sub-sektor tanaman pangan: • Alsintan, penguatan koperasi petani, promosi teknik budidaya berkelanjutan dan ramah lingkungan • Pengembangan kawasan, Pelatihan manajemen usaha tani, implementasi teknik budidaya efektif dan efisien • Monev, sertifikasi usaha yang dibutuhkan petani, promosi produk lokal dan pemberian nilai tambah • Pengolahan limbah hasil kegiatan pertanian, pendampingan kelembagaan petani, optimalisasi badan usaha milik petani/desa, peningkatan kapabilitas dan kuantitas penyuluh, Inisiasi Kemitraan	Sub-sektor tanaman pangan: • Alsintan, pengembangan infrastruktur lanjutan, evaluasi input dan dan distribusi pertanian • Pengembangan kawasan, implementasi teknologi dan evaluasi pencapaian produksi • Monev pasar dan distribusi, penyesuaian strategi agar memiliki nilai tambah • Pengolahan limbah hasil kegiatan pertanian, pendampingan kelembagaan petani, optimalisasi badan usaha milik petani/desa, peningkatan kapabilitas dan kuantitas penyuluh, kemitraan hexahelic
Sub-sektor hortikultura dan biofarmaka: • Penelitian varietas unggul, Inventarisasi lahan potensial (khususnya food estate Mangga),	Sub-sektor hortikultura dan biofarmaka: • Pembukaan lahan baru, Penyiapan sarana produksi,	Sub-sektor hortikultura dan biofarmaka: • Penyediaan bibit unggul, Pengembangan teknologi	Sub-sektor hortikultura dan biofarmaka: • Pengembangan irigasi modern, Pengelolaan sumber daya air	Sub-sektor hortikultura dan biofarmaka: • Peningkatan kapasitas SDM, Pengembangan varietas lokal

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Normalisasi waduk • Pelatihan teknik budidaya, Penguatan kelompok tani • Pengolahan pascapanen, Pembangunan fasilitas penyimpanan • Penguatan kelembagaan petani, Pengembangan sistem informasi	Monitoring, normalisasi waduk • Penerapan teknologi tepat guna, Pendampingan intensif • Pemasaran hasil produk, Penerapan teknologi pengolahan • Akses permodalan, Peningkatan kapasitas kelembagaan	pemupukan, Monitoring dan Evaluasi, normalisasi waduk • Penyuluhan dan bimbingan, Pengelolaan lahan secara berkelanjutan • Diversifikasi produk, Promosi produk lokal • Penyediaan sarana dan prasarana, Pengembangan infrastruktur	• Pengendalian hama terpadu, Penggunaan pestisida alami • Kerjasama dengan industri, Pembukaan akses pasar • Kebijakan pemerintah, Insentif untuk petani	• Peningkatan produktivitas, Pengelolaan limbah pertanian • Ekspor produk unggulan, Sertifikasi produk • Monitoring dan evaluasi, Penghargaan untuk petani berprestasi
Sub-sektor perkebunan: • Alsintan, persiapan lahan, Rehabilitasi infrastruktur (normalisasi waduk) • Pengembangan kawasan, Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan • Pengembangan teknologi pasca panen, Pelatihan pengolahan pasca panen dan pemasaran produk Perkebunan • Pendampingan kelembagaan koperasi petani perkebunan	Sub-sektor perkebunan: • Alsintan, penyediaan bibit atau benih, Pemantauan normalisasi waduk • Pengembangan kawasan, Pelatihan lanjutan, Perencanaan usaha tani • Monev teknologi pasca panen Pengembangan produk olahan perkebunan, sertifikasi produk olahan • Penyediaan sarana dan prasarana, Pengembangan infrastruktur	Sub-sektor perkebunan: • Alsintan, Infrastruktur, Peningkatan mutu, benih atau bibit, Monitoring dan evaluasi normalisasi waduk • Pengembangan kawasan, SOP Budidaya • Inisiasi kemitraan pemasaran produk • Sertifikasi produk	Sub-sektor perkebunan: • Alsintan, penguatan koperasi tanaman Perkebunan • Pengembangan kawasan, Implementasi teknik budidaya yang efektif dan efisien • Monitoring dan evaluasi pasar dan kemitraan yang telah berlangsung • Fasilitasi akses permodalan	Sub-sektor perkebunan: • Alsintan, korporasi petani Perkebunan • Pengembangan kawasan, Implementasi pertanian terintegrasi (terpadu) • Fasilitasi akses permodalan
Sub-sektor ketahanan pangan: • Pemetaan kebutuhan/konsumsi pangan masyarakat daratan Gresik	Sub-sektor ketahanan pangan: • Perbaikan infrastruktur (jalan aspal) di Kebomas yang menjadi	Sub-sektor ketahanan pangan: • Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana distribusi sarana	Sub-sektor ketahanan pangan: • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana distribusi dari	Sub-sektor ketahanan pangan: • Evaluasi kemitraan pengolahan/ pemasaran

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
dan Pulau Bawean; Normalisasi waduk Penyediaan infrastruktur bagi pembangunan lumbung pangan di Pulau Bawean • Peningkatan produksi pangan (bekerja sama dengan Bidang TPHBun) • Distribusi produk mentah melalui ekspor/impur domestik (di dalam Kabupaten Gresik) • Sosialisasi izin edar produk dan keamanan pangan ke pelaku usaha Pelatihan dan Pendampingan bagi Rumah Tangga Tani dalam penyediaan pangan di lumbung pangan Pulau Bawean	salah satu supplier kacang-kacangan, tembakau, maupun ternak ruminansia; Pemantauan normalisasi waduk Pengembangan infrastruktur lumbung pangan di Pulau Bawean • Perencanaan dan pemetaan/penentuan lumbung pangan spesifik komoditas dan spesifik Lokasi • Pengolahan produk mentah menjadi produk intermediet atau produk jadi agar lebih awet • Pelatihan dan Pendampingan bagi Rumah Tangga Tani dalam penyediaan pangan di lumbung pangan, Pendampingan pendaftaran izin edar produk	prasarana pertanian dan pangan dari daratan Gresik ke Pulau Bawean (dan sebaliknya); Monitoring dan evaluasi waduk • Pengembangan lumbung pangan spesifik komoditas dan spesifik Lokasi • Pemasaran produk intermediet dan produk jadi dari spesifik lokasi produsen • Pengecekan seluruh pelaku usaha terkait keamanan pangan yang dijual secara berkala (triwulan), khususnya di lokasi lumbung pangan	daratan Gresik ke Pulau Bawean (dan sebaliknya); Monitoring dan evaluasi waduk • Monitoring dan evaluasi lumbung pangan spesifik komoditas dan spesifik Lokasi • Menjalinkan kemitraan pengolahan/pemasaran • Pengecekan acak keamanan pangan secara berkala (triwulan)	• Pencatatan dan publikasi data ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan pangan khususnya di Pulau Bawean sebagai lokasi lumbung pangan
Sub-sektor kelembagaan: • Pemetaan kebutuhan penyuluh pertanian dan penyuluh peternakan • Peningkatan jumlah penyuluh pertanian dan peternakan. Peningkatan kapasitas penyuluh swadaya melalui Sekolah Lapang berbasis komoditas • Penyusunan materi penyuluhan pertanian dan peternakan secara	Sub-sektor kelembagaan: • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan penyuluh peternakan, serta BPP • Pemanfaatan media digital dan media sosial untuk penyuluhan • Melakukan diskusi secara rutin (triwulan) antara seluruh penyuluh dan seluruh poktan di Kabupaten Gresik	Sub-sektor kelembagaan: • Pencatatan profil poktan, gapoktan, asosiasi, maupun koperasi • Pemanfaatan koperasi sebagai lembaga penyalur/penyedia saprodi • Monitoring dan evaluasi penyuluhan dan diskusi rutin • Kemitraan poktan/gapok	Sub-sektor kelembagaan: • Pelatihan terhadap poktan, gapoktan, asosiasi, maupun koperasi • Monitoring pemanfaatan media digital, media sosial Monitoring pemanfaatan koperasi sebagai penyalur saprodi • Memanfaatkan koperasi (KUD, KOPKAR, KPRI, Koperasi	Sub-sektor kelembagaan: • Fasilitasi akses dana hibah untuk poktan/gapoktan/asosiasi/koperasi • Monitoring pemanfaatan media digital, media sosial Monitoring pemanfaatan koperasi sebagai penyalur saprodi • Monitoring dan evaluasi pemanfaatan koperasi sebagai

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
umum dan spesifik Lokasi • Penyuluh pertanian dan peternakan melakukan pendampingan/sosialisasi pada petani/peternak secara rutin • Penyediaan BPP di Pulau Bawean dan perbaikan kualitas BPP di Gresik daratan. Fasilitasi dan pendampingan SK/badan hukum untuk P4S dan sertifikasi untuk poktan olahan	• Business matching poktan bahan baku dengan pasar	tan/asosiasi dengan KEP	Pedagang Pasar) sebagai lokasi pemasaran produk pertanian • Monev berkala untuk kemitraan yang berjalan	alternatif pasar bagi pelaku usahatani
Sub-sektor peternakan: • Penyiapan lahan dan infrastruktur • Program inseminasi buatan dan pemuliaan untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak • Meningkatkan standar kualitas produk peternakan melalui penerapan teknologi pengolahan yang lebih baik • Pengembangan dan pembinaan kelembagaan peternak Akses peternak terhadap pendanaan dan investasi untuk pengembangan usaha peternakan	Sub-sektor peternakan: • Penyediaan hijauan pakan ternak dan penerapan teknologi pakan berkualitas • Peningkatan populasi dan Produktivitas Ternak • Pengelolaan Kesehatan Ternak • Pengembangan dan penambahan Rumah Potong Hewan/Unggas • Perekrutan penyuluh swadaya mandiri • Inisiasi pembentukan badan usaha milik peternak • Fasilitasi penyediaan permodalan bagi peternak dengan perbankan	Sub-sektor peternakan: • Peningkatan kualitas dan kuantitas pakan melalui rekayasa teknologi • Pelatihan intensif dan edukasi kepada peternak mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan ternak • Membangun jaringan distribusi produk ternak yang terorganisir • Penyediaan bantuan ternak sebagai bahan baku pupuk organik dan diversifikasi usaha (integrasi peternakan dan tanaman pangan)	Sub-sektor peternakan: • Efisiensi penggunaan lahan dengan teknik pertanian terpadu • Diversifikasi Produk Peternakan • Inventing dan Branding produk olahan peternakan lokal • Fasilitasi kerja sama pemasaran dalam sistem jaringan pemasaran modern	Sub-sektor peternakan: • Teknologi peternakan modern seperti sistem manajemen peternakan berbasis data dan otomatisasi. • Membentuk sentra pengendalian dan penanganan kesehatan ternak

3.2. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan sektor pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun untuk menjawab isu strategis sekaligus mencapai tujuan dan sasaran Renstra. Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Penguatan ketahanan pangan dan produksi pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Modernisasi pertanian berbasis inovasi dan teknologi guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.
3. Penguatan kelembagaan petani, penyuluhan, dan SDM pertanian untuk mendorong kemandirian dan profesionalisme petani.
4. Pengembangan hilirisasi, nilai tambah, dan akses pasar melalui pengolahan hasil pertanian, pemasaran digital, dan kemitraan usaha.
5. Pengendalian inflasi pangan strategis dengan menjaga stabilitas produksi, distribusi, dan harga komoditas pertanian.
6. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian untuk mendukung efisiensi usaha tani.
7. Pembangunan pertanian berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan ramah lingkungan.

3.3. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Tabel 3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi	Mendorong integrasi UMKM ke dalam rantai pasok modern, memperluas akses pasar domestik dan ekspor, serta mengembangkan sistem perdagangan yang berbasis nilai tambah produk lokal	Peningkatan daya saing sektor pertanian melalui pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan, implementasi teknologi budidaya dan pascapanen, pengolahan hasil, sertifikasi, promosi produk, hingga ekspor serta penguatan kelembagaan petani dan pembentukan badan usaha milik petani/desa secara bertahap	
2		Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui peningkatan akses terhadap peluang usaha, keterampilan kerja, dan layanan keuangan mikro; mendorong integrasi kelompok rentan dalam rantai pasok lokal dan sektor produktif	Pemberdayaan petani melalui pelatihan budidaya, diversifikasi komoditas bernilai tambah, penyediaan akses permodalan, pendampingan kelembagaan, serta penguatan peran kelompok rentan dalam rantai pasok sektor pertanian	
3		Pemerataan program dan intervensi pengentasan kemiskinan antarwilayah melalui pendekatan kewilayahan berbasis potensi lokal dan kebutuhan riil masyarakat miskin di desa dan daerah tertinggal	Pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal dengan pengembangan lumbung pangan, peningkatan akses sarana produksi pertanian, penyediaan infrastruktur dasar, diversifikasi usaha tani, serta pendampingan poktan/gapoktan	
4		Perluasan akses terhadap sumber daya produktif dan peluang usaha, serta kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal yang inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan wilayah	Peningkatan akses petani terhadap lahan, sarana produksi pertanian, teknologi ramah lingkungan, dan pembiayaan pertanian. Disertai penguatan kelembagaan tani, fasilitasi kemitraan dengan industri, serta penciptaan peluang usaha berbasis agroindustri	
5		Pemerataan pembangunan antarwilayah melalui pendekatan berbasis potensi lokal, peningkatan konektivitas wilayah tertinggal, serta alokasi sumber daya secara adil untuk mempercepat pengentasan ketimpangan spasial	Pemerataan pembangunan sektor pertanian antarwilayah melalui pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi lokal, peningkatan infrastruktur pertanian, serta alokasi sarana produksi dan penyuluhan secara merata	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

**4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik
Tahun 2025-2029**

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran Renstra. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dirumuskan dan tersaji sebagaimana pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.27.2.09.0.00.10.0000 - DINAS PERTANIAN							
- Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal - Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi - Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian				Rasio Net Ekspor (%)		
					Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)		
					Rasio gini (Angka)		
					Indeks Pemerintah Digital (Angka)		
					Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Predikat)		
					Indeks Sistem Merit (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya produksi sektor pertanian			Pertumbuhan produksi komoditas unggulan pertanian (%)		
					Pertumbuhan produksi komoditas unggulan perkebunan (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (Dinas Pertanian)		Pertumbuhan Produksi Komoditas Unggulan Peternakan (%)		
					Persentase alsintan dalam kondisi baik (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Terkelolanya penggunaan sarana pertanian yang efektif dan tepat guna	Persentase realisasi pupuk bersubsidi (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak unggul	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian (Dinas Pertanian)		Persentase Lahan KP2B yang mendapatkan insentif prasarana pertanian (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
					Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Infrastruktur Pertanian (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Terciptanya kawasan pertanian yang tertata dan berkelanjutan dengan dukungan prasarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0007 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
					Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	3.27.03.2.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	
				Tersedianya prasarana pertanian untuk mendukung kegiatan usaha tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Dinas Pertanian)	Menurunnya jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) (%)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
					Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	3.27.04.2.01.0007 - Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan sesuai dengan prosedur karantina dan kesehatan hewan	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Dinas Pertanian)		Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (%)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
					Persentase penanganan perubahan iklim terhadap pertanian (%)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Menurunnya luas areal pertanian yang terdampak bencana (banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian		Presentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan (%)	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
				Meningkatnya jumlah rekomendasi izin usaha pertanian yang diterbitkan tepat waktu sesuai standar pelayanan	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
					Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya jumlah rekomendasi izin usaha peternakan/hewan yang diterbitkan tepat waktu sesuai standar pelayanan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
					Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	3.27.06.2.02.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	
		Meningkatnya ketahanan pangan			Rasio ketersediaan pangan per kapita (Kg/KAP/TH)		
					Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)		
					Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))		
					Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
			Meningkatnya diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Persentase rumah tangga yang menerapkan pola konsumsi B2SA (%)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
					Pertumbuhan skor pola pangan harapan (%)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya pasokan dan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
				Meningkatnya konsumsi pangan perkapita sesuai dengan angka kecukupan gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Meningkatnya penanganan kerawanan		Persentase Penanganan daerah rawan pangan (%)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya ketersediaan data dan informasi ketahanan dan kerawanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Meningkatnya akses pangan bagi masyarakat rentan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan		Persentase keamanan pangan segar (%)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya persentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pengendalian inflasi sektor pertanian			Stabilitas harga pangan utama (%)		
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan		Jumlah produksi pangan lokal (Ton) (Ton)	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
				Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan secara merata	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
		Meningkatnya kesejahteraan petani			Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (Dinas Pertanian)		Persentase alsintan dalam kondisi baik (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Persentase realisasi pupuk bersubsidi (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terkelolanya penggunaan sarana pertanian yang efektif dan tepat guna	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
				Meningkatnya ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak unggul	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian (Dinas Pertanian)		Persentase Lahan KP2B yang mendapatkan insentif prasarana pertanian (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
					Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Infrastruktur Pertanian (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Terciptanya kawasan pertanian yang tertata dan berkelanjutan dengan dukungan prasarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0007 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	3.27.03.2.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	
				Tersedianya prasarana pertanian untuk mendukung kegiatan usaha tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian		Persentase Kelompok Tani Semua Jenjang Naik Kelas (%)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
3.27.2.09.0.00.10.0001 - UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal - Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi - Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi sektor pertanian	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng)		Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) (%)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Menurunnya jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3.27.2.09.0.00.10.0002 - UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal - Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi - Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi sektor pertanian	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang)		Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) (%)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Menurunnya jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3.27.2.09.0.00.10.0003 - UPT Taman Teknologi Pertanian							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal - Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi - Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi sektor pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (UPT Taman Teknologi Pertanian)		Persentase alsintan dalam kondisi baik (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Persentase realisasi pupuk bersubsidi (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Terkelolanya pemanfaatan sumber daya genetik hewan, tumbuhan, dan mikro organisme	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian (UPT Taman Teknologi Pertanian)		Persentase Lahan KP2B yang mendapatkan insentif prasarana pertanian (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Poktan/Gapoktan yang Terasilitasi Infrastruktur Pertanian (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Terciptanya kawasan pertanian yang tertata dan berkelanjutan dengan dukungan prasarana pertanian	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
					Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0008 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
				Tersedianya prasarana pertanian untuk mendukung kegiatan usaha tani	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
		Meningkatnya kesejahteraan petani	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (UPT Taman Teknologi		Persentase alsintan dalam kondisi baik (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Pertanian)				
					Persentase realisasi pupuk bersubsidi (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Terkelolanya pemanfaatan sumber daya genetik hewan, tumbuhan, dan mikro organisme	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian (UPT Taman Teknologi Pertanian)		Persentase Lahan KP2B yang mendapatkan insentif prasarana pertanian (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
					Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Infrastruktur Pertanian (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Terciptanya kawasan pertanian yang tertata dan berkelanjutan dengan dukungan prasarana pertanian	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
					Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0008 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
				Tersedianya prasarana pertanian untuk mendukung kegiatan usaha tani	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
3.27.2.09.0.00.10.0004 - UPT Rumah Pemotongan Hewan							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal - Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi - Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi sektor pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian (UPT Rumah Potong Hewan)		Persentase Lahan KP2B yang mendapatkan insentif prasarana pertanian (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
					Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Infrastruktur Pertanian (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Tersedianya prasarana pertanian untuk mendukung kegiatan usaha tani	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
		Meningkatnya kesejahteraan petani	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian (UPT Rumah Potong Hewan)		Persentase Lahan KP2B yang mendapatkan insentif prasarana pertanian (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Infrastruktur Pertanian (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Tersedianya prasarana pertanian untuk mendukung kegiatan usaha tani	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	

4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka program, kegiatan, dan subkegiatan disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Rincian program, kegiatan, dan subkegiatan beserta kebutuhan pendanaannya, disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				530.084.000		545.805.000		565.847.000		594.195.000		612.334.000		
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				42.350.000		43.606.000		45.207.000		47.472.000		48.921.000		
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	10	50	42.350.000	65	43.606.000	80	45.207.000	90	47.472.000	100	48.921.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0000 - DINAS PERTANIAN	
	Jumlah produksi pangan lokal (Ton) (Ton)	249.232,5	190.000		190.000		190.000		190.000		190.000			
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				42.350.000		43.606.000		45.207.000		47.472.000		48.921.000		
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan secara merata	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	0	6	42.350.000	6	43.606.000	6	45.207.000	6	47.472.000	8	48.921.000		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				32.350.000		33.106.000		34.207.000		35.972.000		36.921.000		
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	0	6	32.350.000	6	33.106.000	6	34.207.000	6	35.972.000	8	36.921.000		
2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik				10.000.000		10.500.000		11.000.000		11.500.000		12.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.000.000	1	11.500.000	1	12.000.000		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				309.377.000		318.552.000		330.250.000		346.794.000		357.381.000		
Meningkatnya diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat	persentase rumah tangga yang menerapkan pola konsumsi B2SA (%)	20	45	309.377.000	50	318.552.000	55	330.250.000	60	346.794.000	65	357.381.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0000 - DINAS PERTANIAN	
	pertumbuhan skor pola pangan harapan (%)	1,08	0,62		0,63		0,64		0,65		0,66			
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				239.377.000		248.552.000		260.250.000		276.794.000		287.381.000		
Meningkatnya pasokan dan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	0	1	239.377.000	1	248.552.000	1	260.250.000	1	276.794.000	1	287.381.000		
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan	1	12		12		12		12					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Lainnya (Laporan)													
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	120		120		120		120		120			
	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				77.377.000		79.552.000		84.250.000		93.794.000		97.381.000		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	1	12	77.377.000	12	79.552.000	12	84.250.000	12	93.794.000	12	97.381.000		
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga (keluarga)	0	120	20.000.000	120	25.000.000	120	30.000.000	120	35.000.000	120	40.000.000		
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000		18.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	0	1	10.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	16.000.000	1	18.000.000		
2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000		
2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000		
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Meningkatnya konsumsi pangan perkapita sesuai dengan angka kecukupan gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				118.300.000		121.808.000		126.281.000		132.608.000		136.656.000		
Meningkatnya penanganan kerawanan	Persentase Penanganan daerah rawan pangan (%)	15,79	18	118.300.000	20	121.808.000	22	126.281.000	24	132.608.000	26	136.656.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0000 - DINAS PERTANIAN	
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi ketahanan dan kerawanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000		
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000		
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				81.300.000		84.808.000		89.281.000		95.608.000		99.656.000		
Meningkatnya akses pangan bagi masyarakat rentan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1	1	81.300.000	1	84.808.000	1	89.281.000	1	95.608.000	1	99.656.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Laporan)													
	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1				1				1			
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				56.300.000		59.808.000		64.281.000		70.608.000		74.656.000		
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	56.300.000	1	59.808.000	1	64.281.000	1	70.608.000	1	74.656.000		
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				60.057.000		61.839.000		64.109.000		67.321.000		69.376.000		
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase keamanan pangan segar (%)	100	87	60.057.000	89	61.839.000	91	64.109.000	93	67.321.000	93	69.376.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0000 - DINAS PERTANIAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				60.057.000		61.839.000		64.109.000		67.321.000		69.376.000		
Meningkatnya persentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2	1	60.057.000	1	61.839.000	1	64.109.000	1	67.321.000	1	69.376.000		
	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1				1				1			
	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1				1				1			
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				20.057.000		20.839.000		22.109.000		24.321.000		25.376.000		
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	20.057.000	1	20.839.000	1	22.109.000	1	24.321.000	1	25.376.000		
2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten/Kota														
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				39.868.311.000		41.050.711.000		42.558.152.000		44.690.191.000		46.045.520.000		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.886.119.000		19.446.237.000		20.160.330.000		21.170.304.000		21.816.607.000		
Meningkatnya pengelolaan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Dinas Pertanian)	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	18.608.911.000	100	19.160.807.000	100	19.864.419.000	100	20.859.568.000	100	21.496.385.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0000 - DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	48	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40	40		40		40		40		40			
3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40	40	35.000.000	40	35.000.000	40	35.000.000	40	35.000.000	40	35.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	48	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000		
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.483.570.604		15.035.466.604		15.739.078.604		16.734.227.604		17.371.044.604		
Terlaksananya kegiatan pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	103	90	14.483.570.604	90	15.035.466.604	90	15.739.078.604	90	16.734.227.604	90	17.371.044.604		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7	6		6		6		6		6			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	111	156		170		185		195		215			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8	6		6		6		6		6			
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.473.361.530		15.025.258.322		15.728.869.793		16.724.019.114		17.360.835.942		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	111	156	14.473.361.530	170	15.025.258.322	185	15.728.869.793	195	16.724.019.114	215	17.360.835.942		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				6.634.074		6.633.282		6.633.811		6.633.490		6.633.662		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	103	90	6.634.074	90	6.633.282	90	6.633.811	90	6.633.490	90	6.633.662		
3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.950.000		1.950.000		1.950.000		1.950.000		1.950.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8	6	1.950.000	6	1.950.000	6	1.950.000	6	1.950.000	6	1.950.000		
3.27.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.625.000		1.625.000		1.625.000		1.625.000		1.625.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7	6	1.625.000	6	1.625.000	6	1.625.000	6	1.625.000	6	1.625.000		
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				447.701.396		447.701.396		447.701.396		447.701.396		447.701.396		
Terlaksananya kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	447.701.396	1	447.701.396	1	447.701.396	1	447.701.396	1	447.701.396		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48	48		48		48		48		48			
3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.557.416		112.557.416		112.557.416		112.557.416		112.557.416		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5	112.557.416	5	112.557.416	5	112.557.416	5	112.557.416	5	112.557.416		
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				56.584.960		56.584.960		56.584.960		56.584.960		56.584.960		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	56.584.960	3	56.584.960	3	56.584.960	3	56.584.960	3	56.584.960		
3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.260.720		15.260.720		15.260.720		15.260.720		15.260.720		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4	15.260.720	4	15.260.720	4	15.260.720	4	15.260.720	4	15.260.720		
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				117.125.000		117.125.000		117.125.000		117.125.000		117.125.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48	48	117.125.000	48	117.125.000	48	117.125.000	48	117.125.000	48	117.125.000		
3.27.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				146.173.300		146.173.300		146.173.300		146.173.300		146.173.300		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	146.173.300	1	146.173.300	1	146.173.300	1	146.173.300	1	146.173.300		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.031.286.000		3.031.286.000		3.031.286.000		3.031.286.000		3.031.286.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	2	3.031.286.000	2	3.031.286.000	2	3.031.286.000	2	3.031.286.000	2	3.031.286.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	93	93		93		93		93		93			
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				333.720.000		333.720.000		333.720.000		333.720.000		333.720.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	2	333.720.000	2	333.720.000	2	333.720.000	2	333.720.000	2	333.720.000		
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.697.566.000		2.697.566.000		2.697.566.000		2.697.566.000		2.697.566.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	93	93	2.697.566.000	93	2.697.566.000	93	2.697.566.000	93	2.697.566.000	93	2.697.566.000		
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				596.353.000		596.353.000		596.353.000		596.353.000		596.353.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10	596.353.000	10	596.353.000	10	596.353.000	10	596.353.000	10	596.353.000		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	2	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	dibayarkan Pajaknya (Unit)															
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit)	1	1				1				1					1
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3				3				3					3
3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.610.000		40.610.000		40.610.000		40.610.000		40.610.000				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	1	40.610.000	1	40.610.000	1	40.610.000	1	40.610.000	1	40.610.000				
3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				124.896.000		124.896.000		124.896.000		124.896.000		124.896.000				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10	124.896.000	10	124.896.000	10	124.896.000	10	124.896.000	10	124.896.000				
3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.419.000		45.419.000		45.419.000		45.419.000		45.419.000				
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	45.419.000	3	45.419.000	3	45.419.000	3	45.419.000	3	45.419.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				385.428.000		385.428.000		385.428.000		385.428.000		385.428.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	385.428.000	1	385.428.000	1	385.428.000	1	385.428.000	1	385.428.000		
Meningkatnya pengelolaan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian di Bawean)	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	20.766.000	100	21.382.000	100	22.168.000	100	23.278.000	100	23.989.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0005 - UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian di Bawean	
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				8.256.000		8.872.000		9.658.000		10.768.000		11.479.000		
Terlaksananya kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	8.256.000	12	8.872.000	12	9.658.000	12	10.768.000	12	11.479.000		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.555.000		1.555.000		1.555.000		1.555.000		1.555.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.555.000	1	1.555.000	1	1.555.000	1	1.555.000	1	1.555.000		
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.501.000		3.117.000		3.903.000		5.013.000		5.724.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.501.000	1	3.117.000	1	3.903.000	1	5.013.000	1	5.724.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.200.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.200.000		
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.510.000		12.510.000		12.510.000		12.510.000		12.510.000		
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12.510.000	12	12.510.000	12	12.510.000	12	12.510.000	12	12.510.000		
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12.510.000		12.510.000		12.510.000		12.510.000		12.510.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12.510.000	12	12.510.000	12	12.510.000	12	12.510.000	12	12.510.000		
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		0		0		0		
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	asi (Unit)														
Meningkatnya pengelolaan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang)	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	17.287.000	100	17.800.000	100	18.453.000	100	19.378.000	100	19.969.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0002 - UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggan		
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				7.299.500		7.812.500		8.465.500		9.390.500		9.981.500			
Terlaksananya kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	7.299.500	1	7.812.500	1	8.465.500	1	9.390.500	1	9.981.500			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7	1				1				1				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1				1				1				
3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.448.100		2.961.100		3.614.100		4.539.100		5.130.100			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.448.100	1	2.961.100	1	3.614.100	1	4.539.100	1	5.130.100			
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.381.400		3.381.400		3.381.400		3.381.400		3.381.400			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	3.381.400	1	3.381.400	1	3.381.400	1	3.381.400	1	3.381.400			
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.470.000		1.470.000		1.470.000		1.470.000		1.470.000			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	7	1	1.470.000	1	1.470.000	1	1.470.000	1	1.470.000	1	1.470.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	SKPD (Laporan)													
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.987.500		9.987.500		9.987.500		9.987.500		9.987.500		
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	9.987.500	12	9.987.500	12	9.987.500	12	9.987.500	12	9.987.500		
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				9.987.500		9.987.500		9.987.500		9.987.500		9.987.500		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	9.987.500	12	9.987.500	12	9.987.500	12	9.987.500	12	9.987.500		
Meningkatnya pengelolaan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng)	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	17.446.000	100	17.963.000	100	18.623.000	100	19.556.000	100	20.153.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0001 - UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng	
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				7.527.500		8.044.500		8.704.500		9.637.500		10.234.500		
Terlaksananya kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	1	7.527.500	1	8.044.500	1	8.704.500	1	9.637.500	1	10.234.500		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1							
3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.058.960		2.576.373		3.236.021		4.168.991		4.766.018		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan .Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.058.960	1	2.576.373	1	3.236.021	1	4.168.991	1	4.766.018		
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.998.540		3.998.127		3.998.479		3.998.509		3.998.482		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	3.998.540	1	3.998.127	1	3.998.479	1	3.998.509	1	3.998.482		
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.470.000		1.470.000		1.470.000		1.470.000		1.470.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	1	1.470.000	1	1.470.000	1	1.470.000	1	1.470.000	1	1.470.000		
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.918.500		9.918.500		9.918.500		9.918.500		9.918.500		
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	9.918.500	12	9.918.500	12	9.918.500	12	9.918.500	12	9.918.500		
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				9.918.500		9.918.500		9.918.500		9.918.500		9.918.500		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	9.918.500	12	9.918.500	12	9.918.500	12	9.918.500	12	9.918.500		
Meningkatnya pengelolaan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPT Rumah Pemotongan Hewan)	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	75.894.000	100	78.145.000	100	81.014.000	100	85.073.000	100	87.670.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0004 - UPT Rumah Pemotongan Hewan	
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				57.963.600		60.214.600		63.083.600		67.142.600		69.739.600		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	5	57.963.600	5	60.214.600	5	63.083.600	5	67.142.600	5	69.739.600		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7		7		7		7					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.068.100		4.068.100		4.068.100		4.068.100		4.068.100		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7	4.068.100	7	4.068.100	7	4.068.100	7	4.068.100	7	4.068.100		
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.200.000		27.200.000		27.200.000		27.200.000		27.200.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	27.200.000	1	27.200.000	1	27.200.000	1	27.200.000	1	27.200.000		
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26.695.500		28.946.500		31.815.500		35.874.500		38.471.500		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	5	26.695.500	5	28.946.500	5	31.815.500	5	35.874.500	5	38.471.500		
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				17.930.400		17.930.400		17.930.400		17.930.400		17.930.400		
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	17.930.400	12	17.930.400	12	17.930.400	12	17.930.400	12	17.930.400		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				17.930.400		17.930.400		17.930.400		17.930.400		17.930.400		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	17.930.400	12	17.930.400	12	17.930.400	12	17.930.400	12	17.930.400		
Meningkatnya pengelolaan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPT Taman Teknologi Pertanian)	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	145.815.000	100	150.140.000	100	155.653.000	100	163.451.000	100	168.441.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0003 - UPT Taman Teknologi Pertanian	
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				21.267.000		21.267.000		21.267.000		21.267.000		21.267.000		
Terlaksananya kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	21.267.000	12	21.267.000	12	21.267.000	12	21.267.000	12	21.267.000		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.208.000		8.208.000		8.208.000		8.208.000		8.208.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	8.208.000	1	8.208.000	1	8.208.000	1	8.208.000	1	8.208.000		
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.459.000		9.459.000		9.459.000		9.459.000		9.459.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	9.459.000	1	9.459.000	1	9.459.000	1	9.459.000	1	9.459.000		
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	3.600.000	12	3.600.000	12	3.600.000	12	3.600.000	12	3.600.000		
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66.373.000		66.373.000		66.373.000		66.373.000		66.374.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	66.373.000	12	66.373.000	12	66.373.000	12	66.373.000	12	66.374.000		
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				66.373.000		66.373.000		66.373.000		66.373.000		66.374.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	66.373.000	12	66.373.000	12	66.373.000	12	66.373.000	12	66.374.000		
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58.175.000		62.500.000		68.013.000		75.811.000		80.800.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	58.175.000	1	62.500.000	1	68.013.000	1	75.811.000	1	80.800.000		
3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				58.175.000		62.500.000		68.013.000		75.811.000		80.800.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	58.175.000	1	62.500.000	1	68.013.000	1	75.811.000	1	80.800.000		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				14.287.366.000		14.711.096.000		15.251.308.000		16.015.354.000		16.504.282.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (Dinas Pertanian)	Persentase realisasi pupuk bersubsidi (%)	81,3	90	14.133.190.000	90	14.552.347.000	90	15.086.730.000	90	15.842.531.000	90	16.326.183.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0000 - DINAS PERTANIAN		
	persentase alsintan dalam kondisi baik (%)	92,6	90		90		90		90		90				
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				13.786.690.000		14.205.847.000		14.740.230.000		15.231.281.000		15.714.933.000			
Terkelolanya penggunaan sarana pertanian yang efektif dan tepat guna	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	16	2	13.786.690.000	2	14.205.847.000	2	14.740.230.000	2	15.231.281.000	2	15.714.933.000			
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1				1				1				
	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0	1				1,5				2				
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2.019.352.300		2.019.352.300		2.019.352.300		2.019.352.300		2.019.352.300			
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	16	2	2.019.352.300	2	2.019.352.300	2	2.019.352.300	2	2.019.352.300	2	2.019.352.300			
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				11.757.337.700		12.171.494.700		12.700.877.700		13.186.928.700		13.665.580.700			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1	11.757.337.700	1	12.171.494.700	1	12.700.877.700	1	13.186.928.700	1	13.665.580.700		
3.27.02.2.01.0003 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		
Tersedianya benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0	1	10.000.000	1,5	15.000.000	2	20.000.000	2,5	25.000.000	3	30.000.000		
3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				346.500.000		346.500.000		346.500.000		611.250.000		611.250.000		
Meningkatnya ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak unggul	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	1	1	346.500.000	1	346.500.000	1	346.500.000	1	611.250.000	1	611.250.000		
3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				346.500.000		346.500.000		346.500.000		611.250.000		611.250.000		
Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	1	1	346.500.000	1	346.500.000	1	346.500.000	1	611.250.000	1	611.250.000		
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (UPT Taman Teknologi Pertanian)	persentase alsintan dalam kondisi baik (%)	92,61	90	154.176.000	90	158.749.000	90	164.578.000	90	172.823.000	90	178.099.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0003 - UPT Taman Teknologi Pertanian	
	Persentase realisasi pupuk bersubsidi (%)	81,3	90		90		90		90		90			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				154.176.000		158.749.000		164.578.000		172.823.000		178.099.000		
Terkelolanya pemanfaatan sumber daya genetik hewan, tumbuhan, dan mikro organisme	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	12	12	154.176.000	12	158.749.000	12	164.578.000	12	172.823.000	12	178.099.000		
3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				154.176.000		158.749.000		164.578.000		172.823.000		178.099.000		
Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	12	12	154.176.000	12	158.749.000	12	164.578.000	12	172.823.000	12	178.099.000		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				4.868.332.000		5.012.715.000		5.196.789.000		5.457.133.000		5.623.733.000		
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian (Dinas Pertanian)	Persentase Lahan KP2B yang mendapatkan insentif prasarana pertanian (%)	49,53	50,97	2.811.355.000	51,69	2.894.733.000	52,41	3.001.032.000	53,14	3.151.375.000	53,86	3.247.584.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0000 - DINAS PERTANIAN	
	Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Infrastruktur Pertanian (%)	32,66	33,3		33,8		34,3		34,8		35,3			
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				733.678.000		733.678.000		733.678.000		733.678.000		733.678.000		
Terciptanya kawasan pertanian yang tertata dan berkelanjutan dengan dukungan prasarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2	2	733.678.000	2	733.678.000	2	733.678.000	2	733.678.000	2	733.678.000		
	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0	38.598		38.598		38.598		38.598					
	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Dokumen)													
	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	4.005		4.000		3.000		2.000		1.000			
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2	2	175.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000		
3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	0	38.598	50.000.000	38.598	50.000.000	38.598	50.000.000	38.598	50.000.000	38.598	50.000.000		
3.27.03.2.01.0007 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan				408.678.000		408.678.000		408.678.000		408.678.000		408.678.000		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	4.005	408.678.000	4.000	408.678.000	3.000	408.678.000	2.000	408.678.000	1.000	408.678.000		
3.27.03.2.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				2.077.677.000		2.161.055.000		2.267.354.000		2.417.697.000		2.513.906.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya prasarana pertanian untuk mendukung kegiatan usaha tani	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	1	2.077.677.000	1	2.161.055.000	1	2.267.354.000	1	2.417.697.000	1	2.513.906.000		
	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	4	0		1		1		1		1			
	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	4	7		7		7		7		7			
	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	1	0		2		2		2		2			
	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0		1		1		1		1			
3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian				0		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	4	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				1.077.677.000		661.055.000		767.354.000		917.697.000		1.013.906.000		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	4	7	1.077.677.000	7	661.055.000	7	767.354.000	7	917.697.000	7	1.013.906.000		
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				0		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	1	0	0	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000		
3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				1.000.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	1	1.000.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian (UPT Rumah Pemotongan Hewan)	Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Infrastruktur Pertanian (%)	32,66	33,3	1.984.083.000	33,8	2.042.926.000	34,3	2.117.945.000	34,8	2.224.048.000	35,3	2.291.945.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0004 - UPT Rumah Pemotongan Hewan	
	Persentase Lahan KP2B yang mendapatkan	49,53	50,97		51,69		52,41		53,14		53,86			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	insentif prasarana pertanian (%)													
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				1.984.083.000		2.042.926.000		2.117.945.000		2.224.048.000		2.291.945.000		
Tersedianya prasarana pertanian untuk mendukung kegiatan usaha tani	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	1	1.984.083.000	1	2.042.926.000	1	2.117.945.000	1	2.224.048.000	1	2.291.945.000		
3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				1.984.083.000		2.042.926.000		2.117.945.000		2.224.048.000		2.291.945.000		
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	1	1.984.083.000	1	2.042.926.000	1	2.117.945.000	1	2.224.048.000	1	2.291.945.000		
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian (UPT Taman Teknologi Pertanian)	Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Infrastruktur Pertanian (%)	32,66	33,3	72.894.000	33,8	75.056.000	34,3	77.812.000	34,8	81.710.000	35,3	84.204.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0003 - UPT Taman Teknologi Pertanian	
	Persentase Lahan KP2B yang mendapatkan insentif prasarana pertanian (%)	49,53	50,97		51,69		52,41		53,14		53,86			
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				72.894.000		75.056.000		77.812.000		81.710.000		84.204.000		
Terciptanya kawasan pertanian yang tertata dan berkelanjutan dengan dukungan prasarana pertanian	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	1	72.894.000	1	75.056.000	1	77.812.000	1	81.710.000	1	84.204.000		
	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	1				1		1		1			
3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen				34.660.000		36.822.000		39.578.000		43.476.000		45.970.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tanaman Pangan														
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	1	34.660.000	1	36.822.000	1	39.578.000	1	43.476.000	1	45.970.000		
3.27.03.2.01.0008 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura				38.234.000		38.234.000		38.234.000		38.234.000		38.234.000		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	1	38.234.000	1	38.234.000	1	38.234.000	1	38.234.000	1	38.234.000		
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				0		0		0		0		0		
Tersedianya prasarana pertanian untuk mendukung kegiatan usaha tani	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				0		0		0		0		0		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				135.344.000		139.358.000		144.476.000		151.714.000		156.345.000		
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Dinas Pertanian)	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) (%)	88,34	90	105.230.000	90	108.352.000	90	112.330.000	90	117.958.000	90	121.559.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0000 - DINAS PERTANIAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				54.230.000		57.352.000		61.330.000		46.958.000		50.559.000		
Menurunnya jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	12	1	54.230.000	1	57.352.000	1	61.330.000	1	46.958.000	1	50.559.000		
	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
3.27.04.2.01.0007 - Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis				34.230.000		36.352.000		39.330.000		23.958.000		26.559.000		
Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	0	1	34.230.000	1	36.352.000	1	39.330.000	1	23.958.000	1	26.559.000		
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		21.000.000		22.000.000		23.000.000		24.000.000		
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	12	1	20.000.000	1	21.000.000	1	22.000.000	1	23.000.000	1	24.000.000		
3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan sesuai dengan prosedur karantina dan kesehatan hewan	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				41.000.000		41.000.000		41.000.000		61.000.000		61.000.000		
Terlaksananya pengawasan terhadap unit usaha pangan asal hewan sesuai dengan persyaratan teknis kesmavet	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1	1	41.000.000	1	41.000.000	1	41.000.000	1	61.000.000	1	61.000.000		
	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	12	1		1		1		1		1			
3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	12	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		
Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000		
3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	1	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang)	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) (%)	88,34	90	15.057.000	90	15.503.000	90	16.073.000	90	16.878.000	90	17.393.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0002 - UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggan	
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				15.057.000		15.503.000		16.073.000		16.878.000		17.393.000		
Menurunnya jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	12	1	15.057.000	1	15.503.000	1	16.073.000	1	16.878.000	1	17.393.000		
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				15.057.000		15.503.000		16.073.000		16.878.000		17.393.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	12	1	15.057.000	1	15.503.000	1	16.073.000	1	16.878.000	1	17.393.000		
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng)	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) (%)	88,34	90	15.057.000	90	15.503.000	90	16.073.000	90	16.878.000	90	17.393.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0001 - UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng	
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				15.057.000		15.503.000		16.073.000		16.878.000		17.393.000		
Menurunnya jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	12	1	15.057.000	1	15.503.000	1	16.073.000	1	16.878.000	1	17.393.000		
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				15.057.000		15.503.000		16.073.000		16.878.000		17.393.000		
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	12	1	15.057.000	1	15.503.000	1	16.073.000	1	16.878.000	1	17.393.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				596.064.000		613.742.000		636.280.000		668.155.000		688.553.000		
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Dinas Pertanian)	Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (%)	1.205	92	596.064.000	93	613.742.000	93	636.280.000	94	668.155.000	94	688.553.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0000 - DINAS PERTANIAN	
	Persentase penanganan perubahan iklim terhadap pertanian (%)	25	95		95		95		95		95			
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				596.064.000		613.742.000		636.280.000		668.155.000		688.553.000		
Menurunnya luas areal pertanian yang terdampak bencana (banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT))	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	8	390	596.064.000	387	613.742.000	387	636.280.000	386	668.155.000	356	688.553.000		
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2.312,4	165		165		165		163		163			
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				167.000.000		167.000.000		167.000.000		167.000.000		167.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2.312,4	165	167.000.000	165	167.000.000	165	167.000.000	163	167.000.000	163	167.000.000		
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				429.064.000		446.742.000		469.280.000		501.155.000		521.553.000		
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	8	390	429.064.000	387	446.742.000	387	469.280.000	386	501.155.000	356	521.553.000		
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				48.727.000		50.172.000		52.014.000		54.620.000		56.000.000		
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Presentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan (%)	100	100	48.727.000	100	50.172.000	100	52.014.000	100	54.620.000	100	56.000.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0000 - DINAS PERTANIAN	
3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				33.727.000		35.172.000		37.014.000		39.620.000		45.000.000		
Meningkatnya jumlah rekomendasi izin usaha pertanian yang diterbitkan tepat waktu sesuai standar pelayanan	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	1	1	33.727.000	1	35.172.000	1	37.014.000	1	39.620.000	1	45.000.000		
	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	1	1				1		1		1			
3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		25.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	1	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	25.000.000		
3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				10.727.000		12.172.000		14.014.000		16.620.000		20.000.000		
Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	1	1	10.727.000	1	12.172.000	1	14.014.000	1	16.620.000	1	20.000.000		
3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		11.000.000		
Meningkatnya jumlah rekomendasi izin usaha peternakan/hewan yang diterbitkan tepat waktu sesuai standar pelayanan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	11.000.000		
3.27.06.2.02.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		11.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	11.000.000		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.046.359.000		1.077.391.000		1.116.955.000		1.172.911.000		1.200.000.000		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelompok Tani Semua Jenjang Naik Kelas (%)	10,98	2,98	1.046.359.000	4,47	1.077.391.000	5,95	1.116.955.000	7,44	1.172.911.000	8,93	1.200.000.000	3.27.2.09.0.00.1 0.0000 - DINAS PERTANIAN	
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1.046.359.000		1.077.391.000		1.116.955.000		1.172.911.000		1.200.000.000		
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3	0	1.046.359.000	1	1.077.391.000	1	1.116.955.000	1	1.172.911.000	1	1.200.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	11	0		1		1		1		1			
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	40	302		302		302		302		302			
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1	1		1		1		1		1			1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Dokumen)													
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				20.014.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	16	16	20.014.000	16	25.000.000	16	25.000.000	16	25.000.000	16	25.000.000		
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				926.345.000		752.391.000		791.955.000		694.911.000		850.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	40	302	926.345.000	302	752.391.000	302	791.955.000	302	694.911.000	302	850.000.000		
3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	11	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				100.000.000		100.000.000		100.000.000		253.000.000		125.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	253.000.000	1	125.000.000		

Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang menandai berakhirnya periode kepemimpinan kepala daerah sekaligus menjadi awal tanggung jawab kepala daerah berikutnya. Dalam perencanaan pembangunan daerah, tahun 2030 memiliki posisi strategis sebagai jembatan kesinambungan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah agar tidak terjadi kekosongan perencanaan akibat pergantian kepemimpinan. Program dan target kinerja tahun 2030 dirumuskan secara sistematis dengan memperhatikan konsistensi terhadap visi, misi, serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sekaligus untuk mendukung capaian prioritas pembangunan daerah jangka panjang menengah berikutnya. Dengan demikian program tahun 2030 tidak hanya sebagai penutup rencana strategis periode berjalan, tetapi juga sebagai pedoman transisi menuju Renstra PD tahun 2030-2034.

4.3. Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan prioritas disusun sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah (nawakarsa). Dengan adanya penetapan subkegiatan prioritas ini, diharapkan pelaksanaan program dapat lebih terarah, terukur, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Rincian subkegiatan prioritas disajikan pada Tabel 4.3. berikut.

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	NAWA KARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Gresik Agropolitan	GOTani (Gresik Ayo Bertani)	Menjamin kesejahteraan petani dengan memastikan ketersediaan pupuk dan pemberian asuransi	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			Persentase Realisasi Pupuk Bersubsidi	90%	90%	90%	90%	90%	90%
								Persentase Alsintan dalam Kondisi Baik	90%	90%	90%	90%	90%	90%
							Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
								Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
								Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-	1 Ton	1,5 Ton	2 Ton	2,5 Ton	3 Ton
								Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
								Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Peningkatan Kualitas RPH	Program penambahan dan	Meningkatnya distribusi dan kualitas	Program Penyediaan dan Pengembangan			Persentase Lahan KP2B yang mendapatkan insentif	50,25%	50,97%	51,69%	52,41%	53,14%	53,86%

NO	NAWA KARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		(Rumah Potong Hewan) dan RPU (Rumah Potong Unggas)	revitalisasi RPH dan RPU	prasarana pertanian	Prasarana Pertanian			prasarana pertanian						
								Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Infrastruktur Pertanian	32,8%	33,3%	33,8%	34,3%	34,8%	35,3%
						Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
								Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
								Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
								Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit
								Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
								Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
							Pembangunan,	Jumlah rumah potong	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

NO	NAWA KARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi						
		Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Alternatif	Pengembangan komoditas tanaman perkebunan contoh tembakau di Bawean, dan biofarmaka	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			Persentase Lahan KP2B yang mendapatkan insentif prasarana pertanian	50,25%	50,97%	51,69%	52,41%	53,14%	53,86%
								Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Infrastruktur Pertanian	32,8%	33,3%	33,8%	34,3%	34,8%	35,3%
						Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
								Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	0 Ha	38.598 Ha	38.598 Ha	38.598 Ha	38.598 Ha	38.598 Ha
								Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	10 Unit	4005 Unit	4000 Unit	3000 unit	2000 unit	1000 unit
								Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
							Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	10 Unit	4005 Unit	4000 Unit	3000 unit	2000 unit	1000 unit

4.4. Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) disusun untuk memastikan adanya keterpaduan antara arah kebijakan daerah dengan RPJMN Tahun 2025–2029. Penetapan subkegiatan dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan di daerah sejalan dengan target pembangunan nasional, sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam pencapaian sasaran strategis RPJMN. Rincian subkegiatan yang mendukung KPU dimaksud dapat dilihat pada Tabel 4.4. berikut.

Tabel 4.4 Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

SUBKEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030	
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 2										
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati										
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (Unit)	6	32,350,000	6	33,106,000	6	34,207,000	6	35,972,000	8	36,921,000
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Pangan Hewani										
3.27.04.2.01.0007 - Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis (Dokumen)	1	34,230,000	1	36,352,000	1	39,330,000	1	23,958,000	1	26,559,000
3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) (Laporan)	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000
3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000
3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000
3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan (Unit Usaha)	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000

4.5. Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional (PPN) dalam RPJMN Tahun 2025–2029 disusun untuk memperkuat peran daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Penetapan subkegiatan ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan di daerah selaras dengan prioritas nasional, sekaligus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Rincian subkegiatan yang mendukung PPN tersebut disajikan pada Tabel 4.5. berikut.

Tabel 4.5 Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL/PROYEK PRIORITAS NASIONAL/SUBKEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030	
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Proyek Prioritas : 02.10.10.04 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan Pendekatan Satu Kesehatan										
3.27.04.2.01.0007 - Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis (Dokumen)	1	34,230,000	1	36,352,000	1	39,330,000	1	23,958,000	1	26,559,000
3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) (Laporan)	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000
3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000
Proyek Prioritas : 02.10.11.01 Input dan Pendukung Pengembangan Pangan										
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (Unit)	6	32,350,000	6	33,106,000	6	34,207,000	6	35,972,000	8	36,921,000
Proyek Prioritas : 02.10.12.01 Analisis dan Fasilitasi Penganekaragaman Pangan										
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000
Proyek Prioritas : 02.10.13.01 Pengawasan Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan										
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan	1	20,057,000	1	20,839,000	1	22,109,000	1	24,321,000	1	25,376,000

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL/PROYEK PRIORITAS NASIONAL/SUBKEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030	
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)										
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000
Proyek Prioritas : 02.10.15.01 Penguatan Sistem Pengendalian Kerawanan Pangan										
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Dokumen)	1	37,000,000	1	37,000,000	1	37,000,000	1	37,000,000	1	37,000,000
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	56,300,000	1	59,808,000	1	64,281,000	1	70,608,000	1	74,656,000
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Laporan)	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000
Proyek Prioritas : 02.10.16.01 Riset dan Inovasi yang Adaptif dan Inklusif										
3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	253,000,000	1	125,000,000
Proyek Prioritas : 02.10.16.02 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia										
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (Unit)	302	926,345,000	302	752,391,000	302	791,955,000	302	694,911,000	302	850,000,000
3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota (Unit)	0	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
Proyek Prioritas : 07.15.01.01 Stabilisasi dan Pengawasan Harga Pangan										
2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	12	77,377,000	12	79,552,000	12	84,250,000	12	93,794,000	12	97,381,000
2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL/PROYEK PRIORITAS NASIONAL/SUBKEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030	
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Harga Pangan Pokok Strategis (Dokumen)										
Proyek Prioritas : 07.15.01.04 Sarana dan Prasarana Penyimpanan Produk										
2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota (Unit)	2	65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000
Proyek Prioritas : 08.03.03.02 Irigasi Pertanian										
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Unit)	0	0	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000
Proyek Prioritas : 08.03.03.04 Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim										
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	165	167,000,000	165	167,000,000	165	167,000,000	163	167,000,000	163	167,000,000
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	390	429,064,000	387	446,742,000	387	469,280,000	386	501,155,000	356	521,553,000
Proyek Prioritas : 08.03.03.05 Penyediaan Pupuk dan Saprodi Pertanian										
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	2	2,019,352,300	2	2,019,352,300	2	2,019,352,300	2	2,019,352,300	2	2,019,352,300
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	11,757,337,700	1	12,171,494,700	1	12,700,877,700	1	13,186,928,700	1	13,665,580,700

4.6. Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Subkegiatan dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gresik disusun untuk memastikan keterpaduan antara arah pembangunan nasional dengan kebijakan pembangunan daerah. Melalui penetapan subkegiatan ini, program dan kegiatan Dinas Pertanian diarahkan agar selaras dengan delapan agenda pembangunan prioritas (Asta Cita) yang menjadi pedoman dalam RPJMN 2025–2029. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra tidak hanya berorientasi pada pencapaian sasaran daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan nasional. Rincian subkegiatan dukungan Asta Cita dimaksud disajikan pada Tabel 4.6. berikut.

Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

SUBKEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030	
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Asta Cita : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
Oucome Prioritas : Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan										
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (Unit)	6	32,350,000	6	33,106,000	6	34,207,000	6	35,972,000	8	36,921,000
Oucome Prioritas : Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat										
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000
Outcome Prioritas : Meningkatnya penanganan kerawanan pangan										
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Dokumen)	1	37,000,000	1	37,000,000	1	37,000,000	1	37,000,000	1	37,000,000
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	56,300,000	1	59,808,000	1	64,281,000	1	70,608,000	1	74,656,000

SUBKEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030	
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Laporan)	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000
Outcome Prioritas : Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan										
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	20,057,000	1	20,839,000	1	22,109,000	1	24,321,000	1	25,376,000
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000
Outcome Prioritas : Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner										
3.27.04.2.01.0007 - Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis (Dokumen)	1	34,230,000	1	36,352,000	1	39,330,000	1	23,958,000	1	26,559,000
3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) (Laporan)	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000
3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000
3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000
3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan (Unit Usaha)	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000
Outcome Prioritas : Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian										
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (Unit)	302	926,345,000	302	752,391,000	302	791,955,000	302	694,911,000	302	850,000,000
3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota (Unit)	0	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	253,000,000	1	125,000,000

SUBKEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030	
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Asta Cita : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba										
Ouctome Prioritas : Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat										
2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	12	77,377,000	12	79,552,000	12	84,250,000	12	93,794,000	12	97,381,000
2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota (Unit)	2	65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000
2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis (Dokumen)	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000
Asta Cita : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur										
Ouctome Prioritas : Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian										
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	2	2,019,352,300	2	2,019,352,300	2	2,019,352,300	2	2,019,352,300	2	2,019,352,300
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	11,757,337,700	1	12,171,494,700	1	12,700,877,700	1	13,186,928,700	1	13,665,580,700
Ouctome Prioritas : Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian										
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Unit)	0	0	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000
Ouctome Prioritas : Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian										
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	165	167,000,000	165	167,000,000	165	167,000,000	163	167,000,000	163	167,000,000
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	390	429,064,000	387	446,742,000	387	469,280,000	386	501,155,000	356	521,553,000

4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dirumuskan sebagai ukuran kinerja yang ingin dicapai selama periode perencanaan. Penetapan target ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas pembangunan sektor pertanian. Dengan adanya target yang terukur, pencapaian sasaran Renstra dapat dievaluasi secara objektif dan berkelanjutan. Rincian target keberhasilan tersebut disajikan pada Tabel 4.7. berikut.

**Tabel 4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra
Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2030**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Pertumbuhan Produksi Komoditas Unggulan Pertanian	%	2,87	0,46	0,46	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48
2	Pertumbuhan Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan	%	0,46	0,45	0,48	0,52	0,55	0,59	0,62	0,59
3	Pertumbuhan Produksi Komoditas Unggulan Peternakan	%	2,02	1,85	1,87	1,9	1,92	1,94	1,97	1,94
4	Rasio Ketersediaan Pangan Per Kapita	Kg/KAP/TH	184,04	184,88	185,73	186,59	187,46	188,36	189,27	188,36
5	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	93,6	94,17	94,75	95,32	95,89	96,46	97,04	96,46
6	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	2,9	2,88	2,85	2,83	2,8	2,78	2,75	2,78
7	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	90,9	80,61	81,32	82,03	82,75	83,46	84,17	83,46
8	Stabilitas Harga Pangan Utama	%	9,39	4,68	4,68	4,7	4,72	4,74	4,77	4,74
9	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	1,63	0.73-2.30	0.85-2.60	0.92-2.90	0.99-3.20	1.03-3.50	1.20-3.70	1.03-3.50

4.8. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai ukuran utama dalam mengukur capaian perangkat daerah. Dengan adanya target IKK yang jelas dan terukur, pelaksanaan program dan kegiatan dapat diarahkan secara lebih fokus, sekaligus memudahkan proses pemantauan serta evaluasi kinerja secara berkala. Rincian target keberhasilan IKK tersebut disajikan pada Tabel 4.8. berikut.

Tabel 4.8. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Rasio Ketersediaan Pangan Per Kapita	Kg/KAP/TH	184,04	184,88	185,73	186,59	187,46	188,36	189,27	188,36
2	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	93,6	94,17	94,75	95,32	95,89	96,46	97,04	96,46
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	90,9	80,61	81,32	82,03	82,75	83,46	84,17	83,46
4	Stabilitas Harga Pangan Utama	%	9,39	4,68	4,68	4,7	4,72	4,74	4,77	4,74
II	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
5	Pertumbuhan Produksi Komoditas Unggulan Pertanian	%	2,87	0,46	0,46	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48
6	Pertumbuhan Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan	%	0,46	0,45	0,48	0,52	0,55	0,59	0,62	0,59
7	Pertumbuhan Produksi Komoditas Unggulan Peternakan	%	2,02	1,85	1,87	1,9	1,92	1,94	1,97	1,94

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sektor pertanian. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, analisis kondisi internal dan eksternal, serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah, nasional, dan global. Renstra ini juga disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan daerah yang lebih tinggi, yaitu RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, serta memperhatikan kebijakan pembangunan pertanian di tingkat provinsi dan nasional.

Dengan ditetapkan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh jajaran perangkat daerah dan pemangku kepentingan pembangunan pertanian dapat menjadikannya sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dokumen ini juga menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja agar pembangunan sektor pertanian dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, terutama para petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Dengan dukungan dan kerja sama yang baik, diharapkan tujuan pembangunan pertanian Kabupaten Gresik, yaitu peningkatan produksi, penguatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani, dapat terwujud pada periode 2025–2029.

Gresik, 18 September 2025
**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GRESIK**



Ir. EKO ANINDITO PUTRO., MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660914 199202 1 002